

PERATURAN NAGARI AUR DURI SURANTIH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 03 TAHUN 2018
Tanggal : 30 Agustus 2018



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJM)
TAHUN 2018 S/D 2024



*“Terbangunnya pemerintahan nagari yang baik, bersih dan bermartabat
sebagai nagari yang Mandiri, bersatu, aman, berbudaya dan beraklaq mulia
guna mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur ”.*



PEMERINTAHAN NAGARI AUR DURI SURANTIH
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
2018



PERATURAN NAGARI AUR DURI SURANTIH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 03 TAHUN 2018

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHNAGARI (RPJMNag)
TAHUN 2018 S/D2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) yang berlaku selama 6 (enam) Tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa/Nagari, RPJMNag ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan Nagari Aur Duri Surantih tanggal 21 Agustus 2018; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampaic, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Aur Duri Surantih 2018 s/d 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741*);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, *Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817*);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

22. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
23. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
24. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Bumdes;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa dalam Bidang Pemerintahan;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
29. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ((Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Tahun 2018 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010



- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW 2010 -2030 Kabupaten Pesisir Selatan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Aur duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
36. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
37. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 ;
38. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari
39. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha MilikNagari;
40. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2017 tentangRencana Pembangunan Kawasan Pedasaan Berbasis pertanian terpadu dengan komoditas unggulan ternak sapi potong di Kecamatan Sutera Tahun 2017 – 2022 (Kecamatan Sutera)
41. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahunan.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AUR DURI SURANTIH

dan

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI AUR DURI SURANTIH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJMNag) TAHUN 2019 s/d 2024



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kecamatan adalah Pariaman Selatan.
4. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari di Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari di Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI dan berada di Kabupaten Pesisir Selatan
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI.
8. Pemerintah nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2020 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari tahun 2019 s/d 2024 yang selanjutnya disebut RPJMNag adalah dokumen perencanaan pembangunan nagari untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2019 s/d 2024.
11. Rencana pembangunan tahunan nagari, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan Nagari untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk



mewujudkan visi.

14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Nagari untuk mencapai tujuan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMNagTahun 2019 s/d 2024 merupakan :

- (1) Penjabaran Visi, Misi, dan Program Wali Nagari terpilih ke dalam strategi Pembangunan Nagari, kebijakan umum, program prioritas Nagari dan arah kebijakan keuangan Nagari, dengan mempedomani RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
- (2) Dokumen perencanaan Nagari yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan nagari dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMNag Tahun 2018 s/d 2024 merupakan :

- (1) Penjabaran Visi, Misi, dan Program Wali Nagari terpilih ke dalam strategi Pembangunan Nagari, kebijakan umum, program prioritas Nagari dan arah kebijakan keuangan Nagari, dengan mempedomani RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
- (2) Dokumen perencanaan Nagari yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan nagari dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan;

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud RPJMNag Aur Duri Surantih Tahun 2018 s/d 2024 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Nagari



Pasal 4

Tujuan RPJMNag Aur Duri Surantih Tahun 2018 s/d 2024 sebagai pedoman dalam:

- (1) Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan nagari dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Nagari Aur Duri Surantih;
- (2) Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Nagari (RKPN);

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RPJMNag Aur Duri Surantih Tahun 2018 s/d 2024 meliputi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Pemerintah Nagari disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (2) RPJMNag Aur Duri Surantih Tahun 2018 s/d 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Wali Nagari pada akhir masa jabatan;

BAB IV

DOKUMEN RPJMNag AUR DURI SURANTIH TAHUN 2018-2024

Pasal 6

Dokumen RPJMNag Aur Duri Surantih Tahun 2018 s/d 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) BAB I : PENDAHULUAN
- 2) BAB II : PROFIL NAGARI
- 3) BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMNag
- 4) BAB IV : VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)
- 5) BAB V : PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMNag Aur Duri Surantih Tahun 2018 s/d 2024, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPN yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- (2) RPJMNag Aur Duri Surantih Tahun 2018 s/d 2024 wajib dilaksanakan oleh Wali Nagari Aur Duri Surantih dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nagari;



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Nagari ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari Aur Duri Surantih.

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, untuk memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Timbulun
Pada Tanggal 30 Agustus 2018



Diundangkan di Timbulun
Pada Tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS NAGARI AUR DURI SURANTIH

PARIAL

LEMBARAN NAGARI AUR DURI SURANTIH TAHUN 2018 NOMOR 03 TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan InayahNya sehingga Tim RPJMNagAur Duri Surantih dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Tahun 2019 s/d 2024.

Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan tidak dapat berjalan dengan baik. Begitu pentingnya kita memahami penataan sebuah perencanaan, sebab dengan perencanaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik pula. Bahkan sesuatu hal yang telah direncanakan belum tentu akan berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Pertimbangannya tentu tidak terlepas dari kondisi waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan pada saat rencana dibuat.

Semua persoalan dalam proses dapat dipetakan sehingga memungkinkan untuk meminimalisir semua kemungkinan yang menjadi titik permasalahannya. Ini telah mengharuskan kita untuk mengokohkan prinsip perencanaan tersebut baik itu dalam hal pembangunan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Pemerintahan nagari diberi amanah untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan nagari, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Musrenbang menghasilkan 3 (tiga) Dokumen Rencana Pembangunan Nagari yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) untuk 6 (enam) Tahun ke depan, Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) untuk 1 (satu) Tahun dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPBNag) juga untuk 1 (satu) Tahun, ke 3 (tiga) Dokumen ini ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Besar harapan kami semoga kedepannya Nagari Aur Duri Surantih lebih baik serta di ridhoi Allah SWT, Amiin.

Timbulun, 30 Agustus 2018

SEKRETARIS NAGARI AUR DURI SURANTIH



PARIAL

Ketua Tim Penyusun



DAFTAR ISI

COVER

PERATURAN NAGARI i

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 6

1.3 Maksud dan Tujuan..... 7

1.4 Manfaat..... 8

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI..... 9

2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Nagari..... 9

2.2. Arah Kebijakan Belanja Nagari 9

2.3 Pembiayaan..... 10

BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI..... 11

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya.. 11

3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari..... 15

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat..... 17

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan..... 18

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI..... 20

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari..... 20

4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat..... 27

4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang..... 29

BAB V PENUTUP..... 38

Lampiran

Daftar Prioritas Masalah

Tabel (Matrik) Program/Kegiatan Satu Tahun

Berita Acara dan Daftar Hadir .

SK Tim Penyusun RPJM Nagari

Proposal Teknis (Gambar Rencana Prasarana)

Rencana Anggaran Biaya

Pemeriksaan Proposal Teknis RAB

Daftar Uulan RKP Nagari



DAFTAR TABEL

1.	Tabel 3.1	Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan nagari Tahun 2018.....	11
2.	Tabel 3.2	Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Tahun 2018.....	12
3.	Tabel 3.3	Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Tahun 2018	13
4.	Tabel 3.4	Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Tahun 2018.....	14
5.	Tabel 4.5	RKP Nagari Aur Duri Surantih Tahun Anggaran 2019	20
6.	Tabel 4.6	Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat Tahun 2019.....	28
7.	Tabel 4.7	Pagu Indikatif Nagari Aur Duri Surantih Tahun 2019.....	30



DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Pendudukn Nagari Menurut Umur	11
2.	Tabel 2.2	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	11
3.	Tabel 2.3	Penduduk menurut Jenis Pekerjaan	12
4.	Tabel 2.4	Penduduk Menurut Indikator Pendidikan	13
5.	Tabel 2.5	Penduduk menurut Kesejahteraan Sosial	14
6.	Tabel 2.6	Penduduk Menurut Agama	15
7.	Tabel 2.7	Prasarana Ekonomi	16
8	Tabel 3.8	Pengkajian Kampung Timbulun	31
9	Tabel 3.9	Pengakajian Kampung Pasir Nan Panjang	42
10	Tabel 3.10	Kelender Musim.....	53
11	Tabel 3.11	Pengkajian Kelender Musim Nagari	54
12	Tabel 3.12	Pengkajian Diagram Venn Kampung Pasir Nan Panjang	61
13	Tabel 3.13	Pengkajian Diagram Venn Kampung Timbulun.....	64
14	Tabel 3.14	Pengelompokan Masalah.....	68
15	Tabel 3.15	Penentuan Peringkat Masalah.....	93
16	Tabel 4.16	Sinkronisasi Misi RPJM Kabupaten denga RPJM Nagari	126
17	Tabel 4.17	Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan	128



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 43 tahun 2014).

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, nagari perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi desanya dimasa yang akan datang, sehingga nagari tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya, potensi dan masalah yang dimiliki, maka desa perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) atau langkah-langkah yang perlu dilakukan selama 6 (enam) tahun.

Pemerintah Nagari dalam menyelenggaraan urusan pembangunan Nagari perlu berdasarkan pada perencanaan pembangunan Nagari yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nagari. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan nagari yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nagari guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nagari menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Nagari yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan nagari. Mengikut sertakan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Nagari. Setiap aspek rencana pembangunan harus disusun berdasarkan kajian masalah dan potensi yang ada di nagari. Hal yang terpenting adalah melakukan kajian masalah dan potensi secara menyeluruh agar menghasilkan perencanaan yang matang dan relevan sehingga arah, tujuan dan kebijakan pembangunan nagari tersaji dalam dokumen RPJMNag ini. Perencanaan pembangunan nagari diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga



kemajuan dan kesatuan nagari. Perencanaan Pembangunan Nagari dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Daerah. Diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, efektif dan efisiensi.

Pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag), yang didukung dengan peningkatan manajemen pemerintahan nagari sebagai basis. Pada konteks itu, efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah nagari membentuk Peraturan Nagari, menetapkan ADD dan Pertanggungjawaban Wali Nagari secara rutin menjadi penting. Hal itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Nagari, kecamatan dan Kabupaten serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBN.

1.2. LANDASAN HUKUM RPJMNag:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor



4700);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan



- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 22. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 23. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
 24. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Bumdes;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa dalam Bidang Pemerintahan;
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 29. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ((Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari



(Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Tahun 2018 Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang RT RW 2010 -2030 Kabupaten Pesisir Selatan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Aur duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
36. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
37. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 ;
38. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari
39. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha MilikNagari;
40. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2017 tentangRencana Pembangunan Kawasan Pedasaan Berbasis pertanian terpadu dengan komoditas unggulan ternak sapi potong di Kecamatan Sutera Tahun 2017 – 2022 (Kecamatan Sutera)
41. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahunan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud disusunnya RPJMNag AurDuri Surantih sebagai dasar dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun kedepan. Dengan dokumen ini, dimaksudkan agar dapat menjadi landasan dan pedoman penyelenggara pemerintah Nagari dan masyarakat Nagari dalam pelaksanaan pembangunan Nagari AurDuri Surantih berdasarkan masalah dan potensi serta arah kebijakan dalam pembangunan di Nagari.

1.3.2 Tujuan

1. Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan



- pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari
2. Merumuskan rencana pembangunan nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
 3. Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan Nagari.
 4. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran.
 5. Meningkatkan peran serta masyarakat di nagari dalam proses pembangunan.

1.4. Manfaat

Manfaat dari sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari ini adalah sebagai pedoman dan acuan kerja Pemerintah untuk pencapaian Visi dan Misi Wali Nagari 6 (enam) Tahun kedepan. Sehingga nampak arah dan tujuan Pembangunan serta Kebijakam Pembangunan Pemerintah Nagari selama 6 (enam) Tahun Pemerintahan berjalan. sehingganya Masyarakat mengetahui seluruh program yang direncanakan oleh Wali Nagari,dan target yang dicapai sesuai dengan prioritas atau sesuai dengan janji politik sewaktu mencalonkan diri,



BAB II
PROFIL NAGARI

2.1 . Sejarah Nagari

Sejarah Nagari Aur Duri Surantih adalah berasal dari pemekaran nagari induk yakni Nagari Surantih. Pada tahun 80-an dimasa Pemerintahan Wali Nagari Bapak ZAINUDDIN KESAH,Nagari Surantih terdiri dari 13 kampung dibawah satu kerapatan Adat Nagari yaitu :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Kampung Pasar Surantih | 8. Kampung Koto Merapak |
| 2. Kampung Sei Sirah | 9. Kampung Kayu Gadang |
| 3. Kampung Rawang | 10. Kampung Ampalu |
| 4. Kampung Gn. Malelo | 11. Kampung Kayu Aro |
| 5. Kampung Pasir nan Panajang | 12. Kampung Batu Bala |
| 6. Kampung Timbulun | 13. Kampung Langgai |
| 7. Kampung Koto Panjang | |

Kemudian untuk pemerintahan Nagari di Sumatera Barat berakhir pada tahun 1983 dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Maka pada tanggal 1 Juli 1983 dengan surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor: SK-162/GSB/1983, maka mulai tanggal 1 Agustus 1983 Pemerintahan Nagari dihapuskan dan dibentuk Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dengan demikian Kampung berubah statusnya menjadi desa yaitu;

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Desa Pasar Surantih | 8. Desa Koto Merapak |
| 2. Desa Sei Sirah | 9. Desa Kayu Gadang |
| 3. Desa Rawang | 10. Desa Ampalu |
| 4. Desa Gn. Malelo | 11. Desa Kayu Aro |
| 5. Desa Pasir nan Panajang | 12. Desa Batu Bala |
| 6. Desa Timbulun | 13. Desa Langgai |
| 7. Desa Koto Panjang | |

Desa Timbulun sebagai Penjabat Kepala Desa yaitu Bapak **BUSRIL** dan dibentuk 3 (tiga) Dusun yaitu;

- | | |
|----------|--------------|
| 1. Dusun | Rumah Gadang |
| 2. Dusun | Lubuk Batu |
| 3. Dusun | Koto Baru |



Desa Pasir nan Panjang sebagai Penjabat Kepala Desa yaitu **By.NURSAL**, dan dibentuk Sebanyak 3 (tiga) dusun seperti:

1. Dusun Tuo
2. Dusun Tangah
3. Dusun Labuah

Kemudian pada tahun 1984 terbentuklah Kepala Desa Defenitif yaitu : **BUSRIL** Kepala Desa Timbulun dan **MARLIS,Rj.Intan** Kepala Desa Pasir nan Panjang. Desa ini bertahan selama dua priode pemilihan Kepala Desa. Pada tahun 1994 dua desa ini bergabung menjadi 1 (satu) Desa dan diberi nama berdasarkan hasil musyawarah yaitu **DESA AUR DURI** dengan menjadikan 5 (lima) dusun yaitu ; (1.) Dusun Rumah Gadang (2.) Dusun Koto Baru (3.) Dusun Lubuk Batu (4.) Dusun Labuah (5.) Dusun Tuo. Desa Aur Duri ini adalah melambangkan sejarah seperti *Bukik Au Baduri*, Bukit ini dijadikan sebagai tempat pemakaman umum masyarakat. **DESA AUR DURI** ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa Yaitu **MARLIS,Rj.Intan**.

Kemudian Tahun 2000 dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor.... Tentang Nagari, dan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Desa. Sehingga Pemerintah Desa kembali kepada Pemerintahan Nagari, yaitu “ NAGARI SURANTIH “ dari 7 (tujuh) Desa dibawah 1(satu) kerapatan Adat Nagari Surantih. Yang dipimpin oleh seorang tokoh mudah “ **ALMASRI,SY** “. Yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kampung, mulai dari ombak badabu sampai kagunuang bakabuik.

Pada Tahun 2010 Nagari Surantih habis masa priode **ALMASRI.SY**. kemudian pada tahun ini juga diadakan pemilihan Wali Nagari baru yang dipimpin oleh “ **KHIRUL KADRI** “ dimasa priode “**KHAIRUL KADRI**” keluarlah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor: 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Peisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Peisir Selatan Nomor : 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Daertah Kabupaten Peisir Selatan nomor : 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Nagari Surantih dimekarkan menjadi 7 (tujuh) Nagari dibawah 1 (satu) Kerapatan Adat Surantih yaitu :

1. Nagari Surantih
2. Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih
3. Nagari Aur Duri Surantih
4. Nagari Koto nan Tigo Selatan Surantih



5. Nagari Koto nan Tigo Utara Surantih
6. Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih
7. Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Peisisr Selatan Nomor : 62 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Aurduri Surantih Kecamatan Sutera dipimpin Langsung dari Pegawai Camat (PNS) sebagai Penjabat Wali Nagari Aur duri Surantih Yaitu “ **SEFNI INDRA JUITA,SE**. Dan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Urusan yakni ; 1. Kepala Urusan Pemerintahan (**PARIAL**), dan Kepala Urusan Kemasyarakatan (**WENDRISNA**).dan 2(dua) orang Kepala Kampung.Saudara **YULINARDI** Kepala Kampung Pasir Nan Panjang dan Timbulun saudara **PIRIN**

Pada masa Penjabat Wali Nagari terbentuk Badan Permusyawaratan Nagari yang disingkat “BAMUSNag” yang terdiri dari 5 (lima) orang dari 5 (lima) Unsur diketuai oleh **FANDRIJAL** dari unsur Cadiak pandai, wakil ketua **ERMAN.L** dari unsur Ulama, Sekretaris **AMYARNIS** dari unsur Bundo kanduang, Anggota **JETRIZANKO** dari unsur Generasi muda, dan **SAPARUDIN** dari unsur Ninik mamak. Dengan kerja sama Pemerintahan Nagari dengan masyarakat secara aman, damai dan lancar lahirilah Wali Nagari Defenitif yaitu “ **RAJUNAS**” Seorang tokoh mudah yang kreatif. Pada bulan Desember 2018 habis masa jabatan wali nagari “ **RAJUNAS**” kembali Nagari Aur Duri Surantih dijabat oleh Pegawai negeri sipil dari kecamatan yaitu “ **Penjabat Wali Nagari Aur duri surantih AKMAL** “.Dalam masa tugas Penjabat wali nagari surantih terbentuk Bamus nagari dari 5 unsur yaitu : Unsur Cadiak Pandai (Bismarjoni), unsur Ulama (Darmisnol), unsur Ninik mamak (Jufrianto), unsur Generasi muda (Webry Haryono), dan unsur bundo kanduang (Gusmaneti).Tugas Utama dari Bamus membentuk pilwana untuk Wali Nagari devenitif. Pada tanggal 3 April 2018 terpilihilah Wali Nagari Aur Duri Surantih devenitif “ **JETRIZANKO,S.Pd** ” dan dilantik pada tanggal 14 Mei 2018.



2.2 PETA DAN KONDISI NAGARI

Nagari Aur Duri Surantih adalah merupakan salah satudari 12 Nagari yang ada di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Ibukota nagari terletak di Timbulun, Jarak dari kecamatan 3,5 km, dari Kabupaten 42 Km, dari Propinsi 118 Km, dari ibukota negara 1.522 Km. Bentangan geografis Nagari Aur Duri Surantih dapat dilihat dari gambar 1 berikut. Daerah yang diarsir merupakan wilayah Nagari Aur Duri Suranti

PETA DAN KONDISI NAGARI AUR DURI SURANTIH



Gambar 1. Peta Nagari Aur Duri Surantih



2.2.1 Demografi

Nagari Aurduri Surantih merupakan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah lebih kurang 831 Ha. Jumlah penduduk Nagari Aur Duri surantih yang berjumlah 6.146 terdiri dari laki-laki 3030 orang dan perempuan 3116 orang.

Tabel 2.1.Penduduk Nagari Aur Duri Surantih menurut umur

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK
0 - 5 Tahun	496 Orang
6 - 12 Tahun	1.258 Orang
13 -16 Tahun	728Orang
17 –25 Tahun	1.221Orang
26 -54 Tahun	1.629Orang
55 Tahun Keatas	814Orang
JUMLAH	6.146 Orang

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2017

Merujuk kepada Profil Nagari Aur Duri Surantih, 15.07 % warga merupakan tamatan perguruan tinggi. 5.62 % merupakan Tamatan akademi. 5.69 % merupakan tamatan SLTA Sederajat. 21.42% merupakan tamatan SLTP/Sederajat. 22.95 % merupakan tamatan SD/Sederajat. Sisanya 18.74 % belum tamat SD/Tidak Tamat SD.

Tabel 2.2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Tamat PT	252 Orang
Tamat Akademi	15 Orang
Tamat SLTA	1.043 Orang
Tamat SLTP	1.065 Orang
Tamat SD	1.553 Orang
Belum Tamat SD/Tidak Tamat SD	1.298 Orang
Tidak Sekolah	1.210 Orang
JUMLAH	6.146 Orang

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2017



Tabel 2.3 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
Buruh tani	1.061Orang
Buruh bangunan	196 Orang
Petani	1831Orang
Peternak	1764Orang
Pedagang	107 Orang
Tukang kayu	114 Orang
Tukang batu	189 Orang
Penjahit	25Orang
Pengrajin	15Orang
Perangkat desa/nagari	17Orang
Industri kecil	5Orang
Pengangkutan	123 Orang
Pegawai negeri sipil	57Orang
TNI/POLRI/	7Orang
Pensiunan	12 Orang
Lain-lain	623 Orang
JUMLAH	6.146Orang

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2017

a. Keadaan fisik/Geografis Nagari

Batas Wilayah Nagari Aur duri Surantih

- Sebelah Utara : Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih
- Sebelah Selatan : Nagari Amping parak
- Sebelah Barat : Nagari Surantih
- Sebelah Timur : Nagari Koto nan Tigo Selatan Surantih

b. Luas wilayah Nagari Aur duri Surantih

- Luas wilayah : 831. ha
 - i. Luas sawah : 460. ha
 - ii. Luas perkarangan : 11. ha
 - iii. Luas tegalan : ha
 - iv. Luas Perkebunan : 360. Ha



c. **Keadaan Topografi Nagari**

Secara umum keadaan topografi Nagari Aur duri Surantih adalah merupakan dataran rendah dan perbukitan.

d. **Iklim**

Iklim dinagari Aur Duri Surantih sebagaimana Nagari lain diwilayah Indonesia mempunyai 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan,hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dinagari aur duri surantih Kecamatan Sutera.

e. **Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari**

Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari meliputi 2 (dua) Kampung dikenagarian Aurduri Surantih yaitu Kampung Timbulun dan Kampung Pasir nan Panjang

2.2.2 **Keadaan Sosial**

Kondisi sosial mencakup adat istiadat, budaya dan agama serta kesehatan, pendidikan dan seni olah raga.Adat istiadat dan budaya masyarakat Desa Pauh Kurai Taji bersifat musyawarah dan mufakat serta kegotong royongan.Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini;Aspek sosial budaya mencakup Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Agama, Pemuda dan Olahraga.

a. **Aspek Pendidikan**

Aspek pendidikan mencakup jumlah prasarana pendidikan, rasio guru dan murid, angka partisipasi sekolah, penurunan jumlah penduduk yang buta huruf dan angka kelulusan pada semua level sekolah. Sebagai terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penduduk Menurut Indikator Pendidikan

INDIKATOR PENDIDIKAN	JUMLAH
Angka Partisipasi kasar/ murni SD/MI	
Angka Partisipasi Kasar/ Murni SLTP/ MTs	
Angka Partisipasi kasar/ murni SLTA	
Rasio guru/ murid TK/PAUD	
Rasio guru/ murid SD	
Rasio guru/ murid SLTP	



Rasio guru/ murid SLTA	
Jumlah TK/PAUD	2/4 unit
Jumlah SD	5 unit
Jumlah SLTP	2 unit
Jumlah SLTA	1 unit
Angka melek buta huruf	
JUMLAH	14 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2017

b. Aspek Kesejahteraan Sosial

Pada aspek Kesejahteraan Sosial, mencakup banyaknya penyandang masalah sosial menurut jenisnya sebagai berikut :

Tabel 2.5 Penduduk Menurut Kesejahteraan Sosial

PENYANDANG MASALAH	JUMLAH
Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar	1 Orang
Tuna susila	- Orang
Tuna Netra	- Orang
Bisu/ Tuli	5 Orang
Yatim Piatu dan Anak Terlantar	84 Orang
Orang jompo	69 Orang
Keluarga pra sejahtera	98 Keluarga
Keluarga sejahtera I	435 Keluarga
Keluarga sejahtera II	444 Keluarga
Keluarga sejahtera III	224 Keluarga
Keluarga sejahtera III +	2 Keluarga
JUMLAH	159 orang dan 1.203 Keluarga

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2017



c. Aspek Kesehatan

Pada Aspek Kesehatan mencakup beberapa indikator pembangunan bidang kesehatan sebagai berikut :

- 1. Angka kematian bayi 0 orang dari jumlah bayi hidup 45 orang pada tahun 2017.
- 2. Angka harapan hidup 75 tahun 2017
- 3. Angka kematian ibu melahirkan 0 orang dari jumlah ibu yang melahirkan 45 orang.
- 4. Kondisi anak dengan kategori gizi buruk 0 %
- 5. Jumlah posyandu 5 (yandu Balita)
- 6. Jumlah Bidan Desa 3 orang
- 7. Jumlah jamban 987 dari kepala keluarga berjumlah 1.453 KK

d. Aspek Agama

Pada aspek agama mencakup struktur penduduk berdasarkan pemeluk agama, 100% penduduk adalah pemeluk agama Islam. Data dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.6 Penduduk Menurut Agama

AGAMA	JUMLAH
Islam	6.146
Kristen	-
Katholik	-
Hindu	-
Budha	-
JUMLAH	6.146

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2017

Prasarana Keagamaan meliputi Masjid dan Mushala/Surau, di Kampung Pasir nan Panjang ada 2 buah Masjid dan 5 buah Mushallah/surau, di Kampung Timbulun ada 3 buah Masjid dan 3 buah Mushallah/surau.



e. Aspek Pemuda dan Olah Raga

Pada aspek pemuda dan olahraga mengandung pengertian bahwa struktur penduduk di Desa Pauh Kurai Taji di dominasi oleh pemuda.Oleh karena itu, pembinaan dan penyediaan fasilitas untuk perkembangan kreatifitas dan olahraga menjadi agenda utama dalam pengembangan pemuda. Fasilitas/ Prasarana yang disediakan untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga serta kesenian meliputi :

- 1. Lapangan Tenis Meja : 1 tempat
- 2. Lapangan Bulu Tangkis : 1 tempat
- 3. Lapangan Sepak Bola : - tempat

f. Aspek Kebudayaan

Kegiatan kebudayaan yang pernah dilakukan di Nagari ini meliputi pengembangan dan pelestarian. Kegiatan yang dilakukan antara lain : Seni Budaya, Randai, Bicara Adat/Basitinah Kato, dan lain-lain

2.2.3 Keadaan Ekonomi

Kegiatan perekonomianNagari dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah prasarana ekonomi,yaitu:

Tabel 2.7 Prasarana Ekonomi

PRASARANA EKONOMI	JUMLAH
Toko/ Kios	22
Warung	42
Lumbung Nagari	-
Mobil pick kup	9
Truk/ col	10
JUMLAH	73

Sumber Data Profil nagari Tahun 2017

Sementara untuk perkembangan Usaha Ekonomi Nagari sebagai berikut :

- 1. Peningkatan kemampuan pengrajin kecil
- 2. Penyaluran modal usaha
- 3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perekonomian Nagari

2.3 KELEMBAGAANNAGARI

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUSNag) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dengan memberi pelayanan kepada masyarakat desa yang mengacu pada pembangunan masyarakat.

Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan melibatkan tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat lainnya.

2.3.1 Pembagian Wilayah Nagari

1. Batas Nagari

- Nagari Aur Duri Surantih berbatasan dengan:
- Sebelah Utara : Berbatas Dengan Nagari Rawang Gunung Malelo
 - Sebelah Selatan : Berbatas Dengan Nagari Amping parak
 - Sebelah Timur : Berbatas Dengan Nagari Surantih
 - Sebelah Barat : Berbatas Dengan Nagri Koto nan Tigo Selatan Surantih



Gambar 2. Batas Nagari Aurduri Surantih



2. Jumlah Kampung

Adapun Jumlah Kampung yang ada di Nagari Aurduri Surantih adalah :

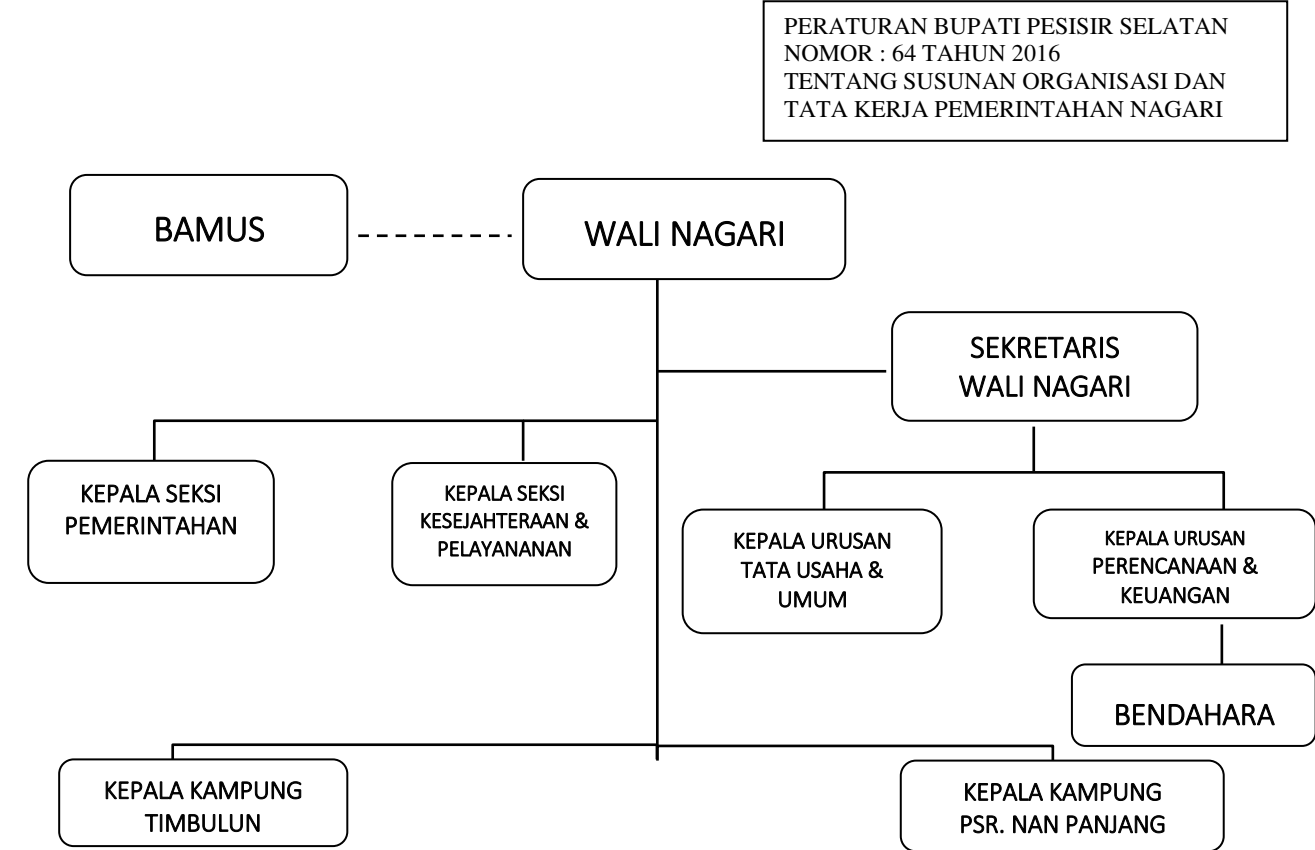
1. Kampung Timbulun
2. Kampung Pasir nan Panjang

2.3.2 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari

1. Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan BAMUS
2. Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mencakup Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya yang terdiri dari 2 (dua) orang Kasi, 2 (dua) Kepala Urusan, 2 (dua) orang Staf, dan 2 (dua) Kepala Kampung. Wali Nagari memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BAMUS.
3. Wali Nagari memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat.
4. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Nagari, Kasi, Kepala Urusan, Staf, dan Kepala Kampung bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
5. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya staf urusan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan dan Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Nagari
6. Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Wali Nagari dapat dibantu Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang ada.



2.3.2.1. STRUKTUR PEMERINTAHAN NAGARIAUR DURI SURANTIH TAHUN 2018



Gambar 3.Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Aur duri Surantih.

2.3.2.2. Badan PermusyawaratanNagri (BAMUS), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1	DARMISNOL	Ketua
2	JUFRIANTO	Wakil Ketua
3	WEBRY HARYONO	Sekretaris
4	BISMARJONI	Anggota
5	GUSMANETI	Anggota

2.3.2.3.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

I.	Ketua	:	Arjoni Purnama Putra
II.	Wakil Ketua	:	Mardafia
III.	Sekretaris	:	Cindy Martina,S.Pd
IV.	Bendahara	:	Rita Yuliana Sari,S.Pd
V.	Seksi-seksi	:	



- VI.

1. Seksi Pembinaan Agama

- Anggota

- Anggota

: Syefri Mulyadi

• Busril

• Zulpadri Candra

2. Seksi Pembinaan Adat

- Anggota

- Anggota

: Rido Febri H

• Rosmalinda

• Jusman

3. Seksi Pembinaan Pendidikan dan Keterampilan

- Anggota

- Anggota

: Risnawati,S.PD

• Indri Belmayuni,S.Sos.I

• Kambarnis

4. Seksi Pembinaan K-3 dan Lingkungan Hidup

- Anggota

- Anggota

- Anggota

: Ahmad Damrelsyah

• Ainil

• Ramadayana

• Ipon

5. Seksi Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana

- Anggota

- Anggota

- Anggota

: Tresia Lingling

• Parida

• Sii

• Idosni

6. Seksi Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Kesenian

- Anggota

- Anggota

: Julianto

• Yogi Abiyul Jamal

• Fakri Wanda

7. Seksi Pembinaan Perekonomian dan Koperasi

- Anggota

- Anggota

: Reski Wandrijo

• Syafridal

• Rio

8. Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana

- Anggota

- Anggota

: Hendrinal

• Delpi Hendri

• Liswaldi

9. Keamanan dan Ketertiban

- Anggota

: Yusrial



- Anggota

10. Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)

- Ilman
- Maiyadi
- : Syuryaniwati
- Refnayati
- Yelni Susanti
- Nahdatur Rahmi
- Yutri Ariza
- Ijus

2.3.2.4. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- I. Ketua : Renalita
- II. Wakil Ketua : Rani Oktavia, S.Hi
- III. Sekretaris : Wendrisna
- IV. Wakil Ketua : Rita Yuliana Sari, S.Ps
- V. Bendahara : Era Ariazona
- VI. Kelompok Kerja I (Pokja I)
 - Ketua : Cici Feprina Winarti,S.Pd.I
 - Sekretaris : Iyus
 - Anggota : 1. Indra Yeni,S.Pd.I
 - 2. Ramadayana
- VII. Kelompok Kerja II (Pokja II)
 - Ketua : Fitriani,S.Pd.I
 - Sekretaris : Asri Novita
 - Anggota : 1. Ivani Noriga Y
 - 2. Ides
 - 3. Risnawati,S.Pd
- VIII. Kelompok Kerja III (Pokja III)
 - Ketua : Yulia Hartati
 - Sekretaris : Elfiyanti
 - Anggota : 1. Emi Dasmadia, S.Pd
 - 2. Susmayeni
 - 3. Fitri



IX. Kelompok Pokja IV (Pokja IV)

- Ketua : Yeng Nofrianti, A.Md.Keb
- Sekretaris : Yelni Susanti
- Anggota : 1. Yati Fitra Roza,A.Md.Keb
2. Ides

2.3.2.5. Karang Taruna, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- Ketua : Sulpardi**
- Wakil Ketua I : Irman
- Wakil Ketua II : Basril
- Sekretaris : Ekriwarman
- Bendahara : Ermalaida

I. Urusan Wajib

- a. Seksi Agama : Ahmad Doni**
 - Anggota : 1. Erman
2. Agus
- b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan : Nofrianto**
 - Anggota : 1. Danil
2. Erif
- c. Seksi Olahraga dan Kesenian : Alfitra**
 - Anggota : 1. Viora
2. Arifin
- d. Seksi Pemberdayaan Peranan Wanita: Iyen**
 - Anggota : 1. Siil
- e. Seksi Pelayanan Sosial & Pengabdian Masyarakat: Marda**
 - Anggota : 1. Andes K
2. Ason

II. Urusan Pilihan

- a. Seksi Hukum Keamanan : Buaris**
 - Anggota : 1. Iyap
2. Angga
- b. Seksi Kesehatan & Lingkungan Hidup : Suria Ningsi**
 - Anggota : 1. Ramadayana
2. Mimi



c. Seksi Humas : Eki Putra

- Anggota : 1. Aset
2. Pindo

2.4 DINAMIKA KONFLIK

Dikenagarian Aur Duri Surantih yang selama ini Masalah Konflik jarang sekali terjadi atau tidak ada terjadi selama Nagari Aur duri Surantih berdiri. Adapun permasalahan yang terjadi hanya kenakalan-kenakalan remaja, permasalahan ini bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakatditingkat Nagari dengan melibatkan unsur mamak suku,ketua pemuda dan Babinkhamtibmas serta Babinsa. Permasalahan juga ada timbul dari batas sepadan tanah, permasalahan ini juga diselesaikan secara musyawarah dan mufakat ditingkat Nagari dengan melibatkan unsur Ninik mamak, mamak suku, Kerapatan Adat Nagari, Babinkhamtibmas, dan Babinsa.Organisasi/kelompok termasuk Lembaga LPMN, BAMUS yang ada dikenagarian Aur duri Surantih cukup berperan aktif sebagai mitra dalam mewujudkan pembangunan dinagari baik fisik maupun non fisik dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Nagari untuk 6 (enam) tahun kedepan dengan Motto Nagari

**“ CINTO KAMPUANG BANGUN NAGARI UNTUK AUR DURI LEBIH BAIK,
BERMARTABAT, BERSATU & BERPRESTASI
DIKABUPATEN PESISIR SELATAN”**

2.5 MASALAH DAN POTENSI

2.5.1 Masalah

2.5.1.1 Bidang Pemerintahan

Nagari Aur Duri Surantih, jika kita lihat dari masalah-masalah yang dihadapi, ada beberapa bidang permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan juga ditingkatkan, diantaranya adalah Bidang Pemerintahan, pada bidang ini masihbelum tertatanya Administrasi Pemerintahan secara maksimal baik secara fisik dan Non Fisik, ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karna berkaitan dengan Administrasi yang merupakan pokok dalam pelaporan penggunaan dana.



Kapasitas Pemerintahan Nagari Aur Duri Surantih belum mencukupi dan memadai pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat menyebabkan pemerintahan nagari kurang dalam pelayanan terhadap masyarakat dan informasi yang dapat meningkatkan pelayanan yang berbasis smart (IT), kalau kita lihat dari segi Regulasi tentang pembuatan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari, Keputusan Wali sulit untuk mendapatkan, hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman tentang penyusunan dan pembuatan peraturan nagari itu sendiri.

Oprasional Pemerintahan Nagari Aur Duri Surantih, kalau kita lihat permasalahan yang dihadapi beberapa tahun belakangan ini, Belum Maksimal, oprasional pemerintahan sehingga satu tahun masa kerja pemerintah sulit tercapai/terwujud. Sedangkan kalau kita lihat dari bidang Sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari Aur Duri Surantih Belum lengkap dan memadai, sehingganya kurang terjaga keamanan dan kenyamanan dalam penata usahaan.

2.5.1.2 Bidang Pembangunan

Bidang pembangunan merupakan bidang yang menjadi sorotan bagi masyarakat Aur Duri Surantih, sehingga pada Bidang Pembangunan ini sering terjadi permasalahan yang sangat perlu untuk disikapi dan ditindak lanjuti oleh pemerintahan Nagari, berdasarkan hasil pemantauan dilapangan terdapat beberapa permasalahan yang timbul dari bidang pembangunan ini, antara lain sebagai berikut :

- **Sub Bidang Pendidikan:** masih banyaknya masyarakat kurang mampu tidak bisa melanjutkan pendidikan dan sarana prasarana sekolah sudah banyak yang rusak.
- **Sub Bidang Kesehatan:** Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peningkatan Gizi Anak dan ibu hamil, Hidup bersih dan belum tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap.
- **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :** Belum adanya tata ruang Nagari dan masih banyak terdapat Jalan-jalan Usaha Tani dan Jalan Kampung serta Jembatan penghubung yang rusak dan berlubang, sehingga menyulitkan para Petani/Pekebun untuk membawa



hasil panen untuk dijual, dan masih banyak rumah tangga yang belum menikmati listrik.

- **Sub Bidang Kawasan Pemukiman** : masih banyak Masyarakat kurang mampu belum mendapatkan Rumah Tangga Layak Huni (RTLH), air bersih, jambanisasi dan bak sampah.
- **Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup** : belum adanya pengelolaan lingkungan hidup di Nagari tentang kesadaran Lingkungan hidup.
- **Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika** : Kurangnya rambu-rambu di jalan Nagari dan penyelenggaraan informasi Publik Nagari
- **Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral** : Belum adanya sumber energi dan sumber daya mineral di nagari Aur Duri Surantih
- **Sub Bidang Pariwisata** : belum adanya pengembangan pariwisata tingkat nagari untuk diminati masyarakat

2.5.1.3 Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Nagari kurangnya kegiatan untuk peningkatan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan yang mendukung proses pembangunan Nagari, seperti : Pokamling, Satlinmas, dan lembaga lainnya, bantuan hukum untuk aparatur nagari dan masyarakat miskin di bidang kebudayaan dan keagamaan. kurangnya pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Nagari tentang festival kesenian, adat dan kebudayaan, keagamaan dan hari besar lainnya. Sedangkan dalam peran perempuan dalam meningkatkan dan mendukung pembangunan di nagari Aur Duri Surantih, masih kurangnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya seperti PKK, Majelis Taklim,

2.5.1.4 Bidang Pemberdayaan

Jika kita lihat dari Bidang Pemberdayaan terdapat beberapa permasalahan yang perlu disikapi seperti, kurangnya pemberdayaan masyarakat mencakup bidang kesehatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menunjang kesejahteraan masyarakat yang mencakup



bidang kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur nagari, pemembrdayaan perempuan dan perlindungan anak, dukungan penanaman modal, perdagangan dan perindustrian.

2.5.1.5 Bidang Penanggulangan Bencana

Bidang penanggulangan Bencana di Nagari Aur Duri Surantih merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat Nagari Aur Duri Surantih merupakan rawan bencana, terutama kampung Timbulun, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan yang sangat perlu jadi perhatian pemerintahan nagari antara lain, belum adanya penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak nagari hal ini menyebabkan pemerintahan nagari sulit dalam penanganan bencana dan mengambil satu tindakan.

2.5.2 Potensi

2.5.2.1 Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan memiliki beberapa potensi yang mendukung permasalahan yang terjadi, seperti sarana dan prasarana kantor dan aparatur nagari cukup, tenaga Aparatur Nagari mencukupi, Karakter masyarakat yang demokratis, karakter masyarakat yang terbuka, dan adat istiadat serta budaya masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran.

2.5.2.2 Bidang Pembangunan

Potensi yang dimiliki Nagari Aur Duri Surantih untuk mengatasi dan menunjang permasalahan pembangunan diantaranya lahan pembangunan tersedia, adanya material yang merupakan bahan dari pembangunan itu sendiri, tenaga pelaksanaan tersedia.

2.5.2.3 Bidang Pembinaan

Masyarakat Nagari Aur Duri Surantih punya potensi di bidang pembinaan dan kelembagaan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kader-kader yang berperan aktif dalam proses ataupun berpartisipasi untuk meningkatkan dan memajukan Nagari Aur Duri Surantih ke arah yang lebih baik.



2.5.2.4 Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Nagari Aur Duri Surantih punya potensi di bidang pemberdayaan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan Nagari Aur Duri Surantih kearah yang lebih baik seperti lembaga dan kelembagaannya lengkap.

2.5.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana

di Nagari Aur Duri Surantih memiliki potensi dalam penanggulangan benncana dapat dilihat dari adanya kader Nagari Siaga, tenaga kesehatan yang memad



BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

3.1 Pengkajian Nagari

a. Pengertian

Pengkajian keadaan Nagari adalah Proses Penggalan dan Pengumpulan Data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat Nagari.

b. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang:

1. Potensi Nagari
2. Permasalahan yang dihadapi
3. Kebutuhan Masyarakat

c. Pendamping Desa

Kegiatan Pengkajian Nagari difasilitasi oleh Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa Wali Nagari, Sekretaris Nagari, LPMN, BAMUS Nagari dan Perangkat Nagari lainnya.

d. Pendekatan dan Metode

1. Penyelarasan Data Terbaru Nagari :
 - a. Pengambilan data dari dokumen dari Nagari
 - b. Perbandingan data Nagari dengan Kondisi Nagari
2. Pengkajian Nagari dilakukan secara Partisipatif dengan menggunakan Metode Partipatory Rural Aprisal (PRA) melalui Sketsa Nagari, Diagram Venn dan Kalender Musim.
3. Solusi dan Tindakan

e. Alat Kajian dan Instrumen

Alat kajian yang digunakan adalah Peta Sosial Nagari, Kalender Musim dan Bagan Hubungan antar Lembaga. Instrumen yang digunakan adalah Form-form b (masukan) dan C (poses) sesuai lampiran Permendagri nomor 114 tahun 2014

f. Proses

1. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau kampung untuk menemukenali Potensi, masalah dan kebutuhan Masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas



2. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah
3. Memfasilitasi Masyarakat dimaksud melakukan pengkajian, tindakan, dan pemecahan masalah
4. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan tingkat peringkat tindakan

g. Waktu Pelaksanaan

Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan Nagari disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Nagari yang bersangkutan

h. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah :

1. Data Potensi Nagari
2. Data Permasalahan
3. Data Kebutuhan/Peringkat tindakan sesuai matrik lampiran Permendagri Nmor 114 tahun 2014



Daftar Masalah dan Potensi Pengkajian Keadaan Nagari Menggunakan Sketsa Nagari Kampung
Timbulun

Tabel. 3.8 Pengkajian Kampung Timbulun

NO	KAMPUNG		MASALAH	POTENSI
1	Timbulun	1	<u>Bidang Pemerintahan</u>	
		1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari (Maksimal 30% kegiatan 1-7)	Kantor ada, tenaga ada
		1.1.01	Kesejahteraan kepala Desa masih kurang memadai	Sumber daya manusia ada
		1.1.02	Kurangnya Kesejahteraan perangkat Desa	Sumber daya manusia ada
		1.1.03	Masih belum memadainya jaminan sosial kepala Desa dan perangkat	Sumber daya manusia ada
		1.1.04	oprasional pemerintah desa tidak memadai	Sumber daya manusia ada
		1.1.05	Masih kurangnya penyediaan tunjangan BPD	Sumber daya manusia ada
		1.1.06	Belum memadainya orasinal BPD	Sumber daya manusia ada
		1.1.07	Masih kurangnya penyediaan insentif serta oprasinal kepala kampung	Sumber daya manusia ada
		1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasaranan Pemerintahan Nagari	
		1.2.01	Sarana perkantoran masih belum memadai	Perangkat Nagari ada
		1.2.02	Belum adanya pemeliharaan gedung kantor	Wilayah, Luas dan Penduduk Padat
		1.2.03	Gedung pelayanan belum maksimal	Perangkat Nagari ada



		1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
		1.3.01	Belum adanya pelayanan berbarbasis IT	Lembaga ada
		1.3.02	Belum lengkapnya profil desa	
		1.3.03	Tidak adanya pengelolaan administrasi	Tenaga ada, jaringan ada
		1.3.04	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil	Lokasi ada
		1.3.05	Belum adanya analisis kemiskinan desa secara partisipatif	Lokasi ada, bahan ada
		1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
		1.4.01	Masih kurangnya biaya pelaksanaan musyawara	Sumber daya manusia ada
		1.4.04	perencanaan Nagari, musyawara Nagari lainnya dan dokumen perencanaan Nagari serta keuangan Nagari	Sumber daya manusia ada
		1.4.05	Belum adanya pengelolaan asset Nagari	Sumber daya manusia ada
		1.4.06	Belum maksimalnya penyusunan kebijakan desa	Sumber daya manusia ada
		1.4.07	Belum maksimalnya laporan wali nagari	Sumber daya manusia ada
		1.4.08	Belum optimalnya sisitem informasi Nagari	Sumber daya manusia ada
		1.4.11	Belum adanya kegiatan lomba Nagari	Sumber daya manusia ada
		1.4.12	Belum adanya peringatan hari jadi Nagari	Sumber daya manusia ada
		2	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari</u>	
		2.1	Sub Bidang Pendidikan	
		2.1.01	Kurangnya kesejahteraan guru PAUD /TK/MDA	Guru ada, Murid Ada



		2.1.06	Kurangnya pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengad aan sarana/prasarana dan mobiler PONPES, MTsM, SD, TK/PAUD, TPQ/MDTQ	Komite sekolah, Gedung ada, Murid Ada
		2.1.07	Tidak adanya taman baca Nagari	Siswa dan guru ada /tanah ada
		2.1.09	Belum adanya kegiatan pembinaan sanggar seni	Sanggar seni ada
		2.1.10	Belum adanya dukungan pendidikan bagi keluarga miskin	Ruang Belajar SD ada
		2.1.11	Tidak Tersedia Alat Kesenian (Drumben)	Guru Ada, Murid Ada
		2.2	Sub Bidang Kesehatan	
		2.2.01	Masih kurang memadainya pelayanan dan penyelenggaraan Kesehatan (POSKESRI dan PKD)	Lahan, Material,Tena ga Kesehatan ada
		2.2.02	Belum mencukupinya penyelenggaraan posyandu	Kader ada
		2.2.03	Masih kurangnya kapasitas penyuluh dan kader kesehatan	Kader ada
		2.2.04	Nagari siaga belum berjalan optimal	Kader ada
		2.2.06	Bina Keluarga Balita tidak berjalan optimal	Kader ada
		2.2.08	sarana dan prasarana posyandu, polindes, PKD belum terpelihara dengan baiak	Kader ada
		2.2.09	Belum optimalnya dan memadai pelayanan posyandu/pokesri/PKD	Kader ada
		2.2.10	Kurang Layaknya Jambanisasi Keluarga	Lahan ada, RTM Ada
		2.2.11	Kurang Tersedianya Air Bersih	PDAM Ada, Lahan Ada
		2.2.12	Kurangnya Insentif Kader Yandu	Kader ada
		2.2.13	Perlunya diadakan pelatihan peningkatan	Kader Ada



		kapasitas kader KB	
	2.2.14	Belum adanya pemasangan Implan yang baik	Kader Ada
	2.2.15	Kurang Memadai Perlengkapan Medis POSKESRI	Tenaga Ada, Poskesri ada
	2.2.16	Perlunya Peningkatan Gizi anak dan Ibu Hamil	Anak dan Ibu Hamil ada
	2.2.17	Perlunya Jaminan Kesehatan Ibu Hamil dan RTM	Ibu Hamil dan RTM ada
	2.2.18	Tidak Tersedianya AMBULANCE	Tenaga ada
	2.2.19	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang DBD	RTM Banyak
	2.2.20	Kurangnya JAMKESMAS dan JAMKESDA	RTM Banyak
	2.2.21	Pagar Poskesri Tidak Ada	Lahan Ada, Gedung Ada
	2.2.22	Pelayanan Posyandu tidak Optimal karena gedung Belum Ada	Kader Ada, Lahan Ada
	2.2.23	Kurang Layaknya Bangunan Poskesri Timbulun	Tenaga Medis Ada, Lahan Ada
	2.2.24	Kurangnya Kesejahteraan Kader UKK Tani	Tenaga Ada
	2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	2.3.01	Jalan Nagari belum terpelihara dengan baik	Lahan Ada
	2.3.02	Jalan lingkungan pemukiman belum terpelihara dengan baiak	Lahan Ada
	2.3.03	Belum adanya pemeliharaan jalan usaha tani	Lahan Ada
	2.3.04	Pemeliharaan jembaran Nagari belum optimal	Lahan Ada
	2.3.05	Prasarana jalan Nagari belum terpelihara dengan baik	Lahan Ada
	2.3.06	Belum terpeliharanya balai kemasyarakatan	Lahan Ada
	2.3.07	Tidak adanya pemeliharaan pemakaman milik desa / situs bersejarah / patilasan	Lahan Ada
	2.3.09	Batas desa belum terpelihara dengan baiak	Lahan Ada



	2.3.10	Jalan Berlobang, becek sulit ditempuh kendaraan	Lahan Ada
	2.3.11	Akses Jalan lingkung pemukiman masih kurang memadai	Lahan Ada
	2.3.12	Tidak Lancarnya Akses Transportasi Hasil Pertanian	Lahan Ada
	2.3.13	Tidak ada Jembatan Permanaen Penghubung	Lahan Ada
	2.3.14	Masih belum meratanya prasarana jalan Nagari	Lahan Ada
	2.3.15	Belum adanya pembangunan situs bersejarah milik Nagari	Lahan Ada
	2.3.16	Sulitnya Menempuh Jalan Ke Pandam Kuburan	Lahan Ada
	2.3.17	Peta wilaya dan peta sosial Nagari belum optimal	Lahan Ada
	2.3.19	Kurang Layaknya Air Kebutuhan Rumah Tangga	Lahan Ada
	2.3.20	Gapura pembatas Nagri belum ada	Lahan Ada
	2.3.21	Tidak Tercapainya Jangka waktu yang Cepat Ke Tempat Evakuasi Tsunami	Lahan Ada
	2.3.22	Kurangnya Pengaman Tebing	Lahan Ada
	2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
	2.4.01	Masih adanya rumah tidak layak huni	Lahan Ada
	2.4.02	Masih banyaknya terdapat genangan air	Lahan Ada
	2.4.03	Sumber air bersih belum terpelihara dengan baik	Lahan Ada
	2.4.04	Masih adanya rumah tangga yang belum tersalurkan air bersih	Lahan Ada
	2.4.05	Senitasi lingkungan masih belum terpelihara dengan baik	Lahan Ada
	2.4.06	Masih banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki jambannisasi	Lahan Ada
	2.4.07	Sampah belum terkelolah dengan baik	Lahan Ada



	2.4.08	Belum adanya tempat pembuangan air limbah dan limbah rumah tangga	Lahan Ada
	2.4.09	Belem lengkapnya tempat bermain anak	Lahan Ada
	2.4.10	Masih banyaknya genangan air didepan pemukiman masyarakat	Lahan Ada
	2.4.11	Masih banyaknya rumah tangga yang belum dialiri air bersih	Lahan Ada
	2.4.12	Masih belum adanya sambungan air bersih kerumah tangga	Lahan Ada
	2.4.13	Masih belum meratanya sanitasi pemukiman	Lahan Ada
	2.4.14	Masih bnyaknya rumah tangga yang belum memiliki jamban umum	Lahan Ada
	2.4.15	Masih belum adanya tempat pembuangan sampah	Lahan Ada
	2.4.16	Masih belum adanya tempat pembuangan limbah	Lahan Ada
	2.4.17	Belum adanya tempat bermain anak yang layak	Lahan Ada
			Lahan Ada
	2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
	2.5.01	Hutan belum terkelolah dengan baiak	Lahan Ada
	2.5.02	Lingkungan hidup belum terkelolah dengan baiak	Lahan Ada
	2.5.03	Masih banyaknya masyarakat yang belum paham dalam mengelolah dan menjaga hutan dan lingkungan hidup	Lahan Ada
	2.5.04	Belum adanya penghijauan pekarangan Rumah (SAO)	Lahan ada Material ada
	2.5.05	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang BIOGAS dan KOMPOS	Lahan ada Material ada



		2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		2.6.01 Belum adanya rambu-rambu jalan	Lahan Ada
		2.6.02 Masih kurangnya informasi publik	Lahan Ada
		2.6.03 Belum adanya jaringan informasi lokal	Lahan Ada
		2.6.04 Sulitnya Menginformasikan kepada Masyarakat Tentang Penggunaan Dana Nagari	Lahan Ada, material Ada
		2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
		2.7.02 Belum adanya energy alternative tingkat desa	Lahan Ada
		2.8 Sub Bidang Pariwisata	
		2.8.02 Belum Termanfaatkan Kawasan Wisata	Lahan Ada, Pengunjung Ada
		3 <u>Bidang Pembinaan Masyarakat Nagari Nagari</u>	
		3.1 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
		3.1.01 Belum adaanya pos keamanan	Pengurus Ada
		3.1.02 Kurangnya Pengetahuan Linmas Tentang Tugas	Pengurus Ada
		3.1.03 Belum adanya keamanan masyarakat berskala local desa	Pengurus Ada
		3.1.04 Pelaksanaan Kegiatan bencana skala local desa belum ada	Pengurus Ada
		3.1.05 Tidak Adanya Fasilitas Linmas	Pengurus Ada
		3.1.06 Kurangnya Kesadaran aparatur desa dan Masyarakat Tentang Hukum	SDM Ada
		3.1.07 Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang hokum	Pengurus Ada
		Kurangnya Kesejahteraan Linmas	Pengurus Ada
		3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
		3.2.01 Belum maksimalnya pembinaan terhadap grub	Nagari Ada



			kesenian dan kebudayaan	
		3.2.03	Tidak adanya Iven Antar Nagari	Nagari Ada
		3.2.04	Kurangnya penjagaan atas aset kesenian , kebudayaan dan keagamaan	Pengurus Ada
		3.2.05	Belum memadainya sarana dan prasarana kesenian, kebudayaan dan keagamaan	Pengurus Ada
		3.2.06	Kurangnya SDM Tentang HUT RI	SDM Ada
		3.2.07	Kurangnya Kesejahteraan Imam Khotib dan Bilal	SDM ada
		3.2.08	Langkahnya Alat Kesenian Daerah	Sanggar Ada
		3.2.09	Kurangnya Pelatihan tentang Budaya Minang Kabau	SDM Ada
		3.3	Sub Bidang Kepemudaan Olah Raga	
		3.3.02	Kurangnya Semanganya Pemuda dengan Olah Raga	SDM Ada
		3.3.03	Tidak Adanya Kegiatan Iven Pemuda Nagari	Pemuda Ada
		3.3.06	Kurangnya SDM Pemuda	Pemuda Ada
		3.3.05	Pelaksanaan Kegiatan Pemuda Belum Semua Berjalan	Pengurus Ada
		3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
		3.4.03	Kurangnya Pemahaman Tentang Kegiatan PKK	Pengurus Ada
		3.4.0 5	Kegiatan PKK Nagari Belum Semuanya Berjalan	Pengurus Ada, Lahan Ada
		3.4.01	Belum Adanya Pelatihan Adat	SDM Ada
		3.4.02	Kurangnya Pemahaman Tentang Kegiatan LPMN	Pengurus Ada
		3.4.04	Kurangnya Pemahaman Tentang Nagari SIAGA	Pengurus Ada
		4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari</u>	
		4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
		4.1.03	Belum Adanya Keramba Jaring Apung	Lahan Ada,



		Kelompok Ada
4.1.05	Tidak Tersedianya Bibit Ikan	Lahan Ada
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
4,2,01	Masih kurangnya produksi tanaman pangan	Tenaga ada
4.2.02	Masih kurangnya produksi peternakan	Lahan Ada, Kelompok Ada
4.2.03	Masih kurangnya embung padi	Lahan Ada, Kelompok Ada
4.2.05	Kurangnya pengetahuan petani dalam pengolahan tananman Cabe	Lahan ada Petani ada
4.2.06	Banyaknya hama yang menyerang Tanaman Masyarakat	Tenaga ada
4.2.07	Bibit Unggul tidak tersedia	Lahan sawah ada
4.2.08	Mahalnya Pupuk An Organik	Lahan ada Petani ada
4.2.09	Belun adanya bibit unggul Sawit	Lahan ada Petani ada
4.2.10	Kurang Tersediannya Benih Pokok Tanaman Padi	Lahan ada Petani ada
4.2.11	Belum adanya bantuan bibit unggul tanaman kacang tanah	Lahan ada Petani ada
4.2.12	Belum adanya Bantuan bibit unggul tanaman jagung	Lahan ada Petani ada
4.2.13	Belum adanya bantuan bibit unggul tanaman padi	Lahan ada Petani ada
4.2.14	Belum adanya Subsidi Benih Penangkar Tanaman Padi	Lahan ada Petani ada
4.2.15	11. Kurang Tersedianya Bibit Sapi Penggemukkan	Kelompok Ternak ada
4.2.16	Rusaknya JIDES dan JITUT	Kelompok



		Tani ada
4,3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	
4.3.01	Masih belum pahamnya wali nagari dalam menjalankan roda pemerintahan	Pemerintahan ada
4.3.02	Masih kurangnya pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan tingkat pelayanan	Perangkat ada
4.3.03	Masih belum maksimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan nagari	Lembaga ada
4,4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	
4.4.01	Kurangnya keikutsertaan perempuan dalam meningkatkan pembangunan nagari	Lembaga ada
4.4.02	Masih adanya anak-anak terlantar dan jadi korban kejahatan/kriminal	Lembaga ada
4,5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
4.5.01	Kelembagaan koperasi kurang tertata dengan baik	Kelompok SPP Ada
4.5.02	Kelembagaan Koperasi kurang diminati masyarakat	Ada
4.5.03	Kurangnya terlatih masyarakat dalam menjalankan unit usaha	Sumbar daya alam ada masyarakat ada
4,6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
4.6.02	Kelembagaan badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) kurang diminati masyarakat	Masyarakat ada
4,6,01	Kurangnya Pemahaman Pengurus BUMNAG Tentang Laporan dan Pengelolaan	Bumnag Ada, Pengurus Ada
4.6.03	Masih belum adanya teknologi tepat guna	Bumnag ada
4,7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
4.7.02	Pasar Tidak Ada di Nagari sehingga Kegiatan Ekonomi Harus Ke Nagari Lain	Produksi Komoditas



				Pertanian Tinggi
		5	<u>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari</u>	
		5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
		5.1.01	Tidak adanya bantuan dan alat-alat perlengkapan Evakuasi Bencana	Bahan Ada, Tempat Penjual Ada
		5.1.02	Tidak adanya penanganan Pra Bencana, Sedang Bencana dan Pasca bencana	Rawan Bencana, tenaga ada
		5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	
		5.2.01	Tidak adanya Alat Transportasi Tanggap Darurat	Lokasi ada, Alat ada
		5.2.02	Tidak adanya sembako	Tenaga ada, Bahan ada
		5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	
		5.3.01	Runtuh / Rusak prasarana Masyarakat akibat bencana	Tenaga ada, Alat dan Bahan ada



Daftar Masalah dan Potensi Pengkajian Keadaan Nagari Menggunakan Sketsa Nagari Kampung
Pasir Nan Panjang

Tabel. 3.9 Pengkajian Kampung Pasir Nan Panjang

No	Kampung	No rek	Masalah	Potensi
2	Pasir Nan Panjang	1	<u>Bidang Pemerintahan</u>	
		1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari (Maksimal 30% kegiatan 1-7)	Kantor ada, tenaga ada
		1.1.01	Kesejahteraan kepala Desa masih kurang memadai	Sumber daya manusia ada
		1.1.02	Kurangnya Kesejahteraan perangkat Desa	Sumber daya manusia ada
		1.1.03	Masih belum memadainya jaminan sosial kepala Desa dan perangkat	Sumber daya manusia ada
		1.1.04	oprasional pemerintah desa tidak memadai	Sumber daya manusia ada
		1.1.05	Masih kurangnya penyediaan tunjangan BPD	Sumber daya manusia ada
		1.1.06	Belum memadainya orasinal BPD	Sumber daya manusia ada
		1.1.07	Masih kurangnya penyediaan insentif serta oprasinal kepala kampung	Sumber daya manusia ada
		1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasaranan Pemerintahan Nagari	Perangkat Nagari ada
		1.2.01	Sarana perkantoran masih belum memadai	Perangkat Nagari ada
		1.2.02	Belum adanya pemeliharaan gedung kantor	Wilayah, Luas dan Penduduk Padat
		1.2.03	Gedung pelayanan belum maksimal	Perangkat Nagari ada



		1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Perangkat Nagari ada
	1.3.01	Belum adanya pelayanan berbarbasis IT	Lembaga ada
	1.3.02	Belum lengkapnya profil desa	Lembaga ada
	1.3.03	Tidak adanya pengelolaan administrasi	Tenaga ada, jaringan ada
	1.3.04	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil	Lokasi ada
	1.3.05	Belum adanya analisis kemiskinan desa secara partisipatif	Lokasi ada, bahan ada
		1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
	1.4.01	Masih kurangnya biaya pelaksanaan	Perangkat Nagari ada
	1.4.02	musyawara perencanaan Nagari, musyawara Nagari lainnya dan dokumen perencanaan Nagari serta keuangan Nagari	Perangkat Nagari ada
	1.4.05	Belum adanya pengelolaan asset Nagari	Pengurus ada, aset ada
	1.4.06	Belum maksimalnya penyusunan kebijakan desa	Perangkat Nagari ada
	1.4.07	Belum maksimalnya laporan wali nagari	Perangkat Nagari ada
	1.4.08	Belum optimalnya sisitem informasi Nagari	Perangkat Nagari ada
	1.4.11	Belum adanya kegiatan lomba Nagari	Perangkat Nagari ada
	1.4.12	Belum adanya peringatan hari jadi Nagari	Perangkat Nagari ada



		2	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari</u>	
		2.1	Sub Bidang Pendidikan	
		2.1.01	Kurangnya kesejahteraan guru PAUD /TK/MDA	Guru ada, Bangunan ada, Murid Ada
		2.1.06	Kurangnya pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pe ngadaan sarana/prasarana dan mobiler PONPES, MTsM, SD, TK/PAUD, TPQ/MDTQ	Komite sekolah, Gedung ada, Murid Ada
		2.1.07	Tidak adanya taman baca Nagari	Siswa dan guru ada /tanah ada
		2.1.09	Belum adanya kegiatan pembinaan sanggar seni	Pondok Pesantren ada
		2.1.10	Belum adanya dukungan pendidikan bagi keluarga miskin	Ruang Belajar SD ada
		2.1.11	Tidak Tersedia Alat Kesenian (Drumben)	Guru Ada, Murid Ada
		2.2	Sub Bidang Kesehatan	
		2.2.01	Masih kurang memadainya pelayanan dan penyelenggaraan Kesehatan (POSKESRI dan PKD)	Lahan, Material,Tenaga Kesehatan ada
		2.2.02	Belum mencukupinya penyelenggaraan posyandu	Tenaga ada
		2.2.03	Masih kurangnya kapasitas penyuluh dan kader kesehatan	Tenaga ada
		2.2.04	Nagari siaga belum berjalan optimal	Tenaga ada
		2.2.06	Bina Keluarga Balita tidak berjalan optimal	Tenaga ada
		2.2.08	sarana dan prasarana posyandu, polindes, PKD belum terpelihara dengan baiak	Tenaga ada
		2.2.09	Belum optimalnya dan memadai pelayanan posyandu/pokesri/PKD	Tenaga ada



		2.2.10	Kurang Layaknya Jambanisasi Keluarga	Lahan ada, RTM Ada
		2.2.11	Kurang Tersedianya Air Bersih	PDAM Ada, Lahan Ada
		2.2.12	Kurangnya Insentif Kader Yandu	Kader ada
		2.2.13	Perlunya diadakan pelatihan peningkatan kapasitas kader KB	Kader Ada
		2.2.14	Belum adanya pemasangan Implan yang baik	Kader Ada
		2.2.15	Kurang Memadai Perlengkapan Medis POSKESRI	Tenaga Ada, Poskesri ada
		2.2.16	Perlunya Peningkatan Gizi anak dan Ibu Hamil	Anak dan Ibu Hamil ada
		2.2.17	Perlunya Jaminan Kesehatan Ibu Hamil dan RTM	Ibu Hamil dan RTM ada
		2.2.18	Tidak Tersedianya AMBULANCE	Tenaga ada
		2.2.19	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang DBD	RTM Banyak
		2.2.20	Kurangnya JAMKESMAS dan JAMKESDA	RTM Banyak
		2.2.21	Pagar Poskesri Tidak Ada	Lahan Ada, Gedung Ada
		2.2.22	Pelayanan Posyandu tidak Optimal karena gedung Belum Ada	Kader Ada, Lahan Ada
		2.2.23	Kurang Layaknya Bangunan Poskesri Timbulun	Tenaga Medis Ada, Lahan Ada
		2.2.24	Kurangnya Kesejahteraan Kader UKK Tani	Tenaga Ada
		2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		2.3.01	Jalan Nagari belum terpelihara dengan baik	Lahan ada, tenaga ada
		2.3.02	Jalan lingkungan pemukiman belum terpelihara dengan baiak	Lahan ada, tenaga ada



	2.3.03	Belum adanya pemeliharaan jalan usaha tani	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.04	Pemeliharaan jembaran Nagari belum optimal	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.05	Prasarana jalan Nagari belum terpelihara dengan baik	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.06	Belum terpeliharanya balai kemasyarakatan	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.07	Tidak adanya pemeliharaan pemakaman milik desa / situs bersejarah / patilasan	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.09	Batas desa belum terpelihara dengan baik	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.10	Jalan Berlobang, becek sulit ditempuh kendaraan	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.11	Akses Jalan lingkung pemukiman masih kurang memadai	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.12	Tidak Lancarnya Akses Transportasi Hasil Pertanian	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.13	Tidak ada Jembatan Permanaen Penghubung	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.14	Masih belum meratanya prasarana jalan Nagari	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.15	Belum adanya pembangunan situs bersejarah milik Nagari	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.16	Sulitnya Menempuh Jalan Ke Pandam Kuburan	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.17	Peta wilaya dan peta sosial Nagari belum optimal	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.19	Kurang Layaknya Air Kebutuhan Rumah Tangga	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.20	Gapura pembatas Nagri belum ada	Lahan ada, tenaga ada
	2.3.21	Tidak Tercapainya Jangka waktu yang Cepat Ke Tempat Evakuasi Tsunami	Lahan ada, tenaga ada



		2.3.22	Kurangnya Pengaman Tebing	Lahan ada, tenaga ada
		2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
		2.4.01	Masih adanya rumah tidak layak huni	Lahan ada, tenaga ada
		2.4.02	Masih banyaknya terdapat genangan air	Lahan ada, tenaga ada
		2.4.03	Sumber air bersih belum terpelihara dengan baik	Lahan ada, tenaga ada
		2.4.04	Masih adanya rumah tangga yang belum tersalurkan air bersih	Lahan ada, tenaga ada
		2.4.05	Sanitasi lingkungan masih belum terpelihara dengan baik	Lahan ada, tenaga ada
		2.4.06	Masih banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki jambannisasi	Lahan ada, tenaga ada
		2.4.07	Sampah belum terkelolah dengan baik	Lahan ada, tenaga ada
		2.4.08	Belum adanya tempat pembuangan air limbah dan limbah rumah tangga	Lahan ada, tenaga ada
		2.4.09	Belem lengkapnya tempat bermain anak	Lahan ada, tenaga ada
		2.4.10	Masih banyaknya genangan air didepan pemukiman masyarakat	Lahan ada, tenaga ada
		2.4.11	Masih banyaknya rumah tangga yang belum dialiri air bersih	Lahan ada, tenaga ada
		2.4.12	Masih belum adanya sambungan air bersih kerumah tangga	Lahan ada, tenaga ada
		2.4.13	Masih belum meratanya sanitasi pemukiman	Lahan ada, tenaga ada
		2.4.14	Masih bnyaknya rumah tangga yang belum memiliki jamban umum	Lahan ada, tenaga ada
		2.4.15	Masih belum adanya tempat pembuangan sampah	Lahan ada, tenaga ada
		2.4.16	Masih belum adanya tempat pembuangan	Lahan ada, tenaga



		limbah	ada
	2.4.17	Belum adanya tempat bermain anak yang layak	Lahan ada, tenaga ada
	2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
	2.5.01	Hutan belum terkelolah dengan baiak	Lahan ada, tenaga ada
	2.5.02	Lingkungan hidup belum terkelolah dengan baiak	Lahan ada, tenaga ada
	2.5.03	Masih banyaknya masyarakat yang belum paham dalam mengelolah dan menjaga hutan dan lingkungan hidup	Lahan ada, tenaga ada
	2.5.04	Belum adanya penghijauan pekarangan Rumah (SAO)	Lahan ada Material ada
	2.5.05	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang BIOGAS dan KOMPOS	Lahan ada Material ada
	2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	2.6.01	Belum adanya rambu-rambu jalan	Lahan ada, tenaga ada
	2.6.02	Masih kurangnya informasi publik	Lahan ada, tenaga ada
	2.6.03	Belum adanya jaringan informasi lokal	Lahan ada, tenaga ada
	2.6.04	Sulitnya Menginformasikan kepada Masyarakat Tentang Penggunaan Dana Nagari	Lahan Ada, material Ada
	2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
	2.7.02	Belum adanya energy alternative tingkat desa	Lahan ada, tenaga ada
	2.8	Sub Bidang Pariwisata	
	2.8.02	Belum Termanfaatkan Kawasan Wisata	Lahan Ada, Pengunjung Ada



		3	<u>Bidang Pembinaan Masyarakat Nagari Nagari</u>	
		3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
		3.1.01	Belum adanya pos keamanan	Pengurus Ada
		3.1.02	Kurangnya Pengetahuan Linmas Tentang Tugas	Pengurus Ada
		3.1.03	Belum adanya keamanan masyarakat berskala local desa	Pengurus Ada
		3.1.04	Pelaksanaan Kegiatan bencana skala local desa belum ada	Pengurus Ada
		3.1.05	Tidak Adanya Fasilitas Linmas	Pengurus Ada
		3.1.06	Kurangnya Kesadaran aparaturnya desa dan Masyarakat Tentang Hukum	SDM Ada
		3.1.07	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang hukum	Pengurus Ada
		3.1.08	Kurangnya Kesejahteraan Linmas	Pengurus Ada
		3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
		3.2.01	Belum maksimalnya pembinaan terhadap grub kesenian dan kebudayaan	Nagari Ada
		3.2.03	Tidak adanya Iven Antar Nagari	Nagari Ada
		3.2.04	Kurangnya penjagaan atas aset kesenian , kebudayaan dan keagamaan	Pengurus Ada
		3.2.05	Belum memadainya sarana dan prasarana kesenian, kebudayaan dan keagamaan	Pengurus Ada
		3.2.06	Kurangnya SDM Tentang HUT RI	SDM Ada
		3.2.07	Kurangnya Kesejahteraan Imam Khotib dan Bilal	SDM ada
		3.2.08	Langkahnya Alat Kesenian Daerah	Sanggar Ada
		3.2.09	Kurangnya Pelatihan tentang Budaya Minang Kabau	SDM Ada



		3.3	Sub Bidang Kepemudaan Olah Raga	
		3.3.02	Kurangnya Semanganya Pemuda dengan Olah Raga	SDM Ada
		3.3.03	Tidak Adanya Kegiatan Iven Pemuda Nagari	Pemuda Ada
		3.3.06	Kurangnya SDM Pemuda	Pemuda Ada
		3.3.05	Pelaksanaan Kegiatan Pemuda Belum Semua Berjalan	Pengurus Ada
		3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
		3.4.03	Kurangnya Pemahaman Tentang Kegiatan PKK	Pengurus Ada
		3.4.0 5	Kegiatan PKK Nagari Belum Semuanya Berjalan	Pengurus Ada, Lahan Ada
		3.4.01	Belum Adanya Pelatihan Adat	SDM Ada
		3.4.02	Kurangnya Pemahaman Tentang Kegiatan LPMN	Pengurus Ada
		3.4.04	Kurangnya Pemahaman Tentang Nagari SIAGA	Pengurus Ada
		4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari</u>	
		4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
		4.1.03	Belum Adanya Keramba Jaring Apung	Lahan Ada, Kelompok Ada
		4.1.05	Tidak Tersedianya Bibit Ikan	Lahan Ada
		4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
		4,2,01	Masih kurangnya produksi tanaman pangan	Tenaga ada
		4.2.02	Masih kurangnya produksi peternakan	Lahan Ada, Kelompok Ada
		4.2.03	Masih kurangnya embung padi	Lahan Ada, Kelompok Ada
		4.2.05	Kurangnya pengetahuan petani dalam pengolahan tananman Cabe	Lahan ada Petani ada



	4.2.06	Banyaknya hama yang menyerang Tanaman Masyarakat	Tenaga ada
	4.2.07	Bibit Unggul tidak tersedia	Lahan sawah ada
	4.2.08	Mahalnya Pupuk An Organik	Lahan ada Petani ada
	4.2.09	Belun adanya bibit unggul Sawit	Lahan ada Petani ada
	4.2.10	Kurang Tersediannya Benih Pokok Tanaman Padi	Lahan ada Petani ada
	4.2.11	Belum adanya bantuan bibit unggul tanaman kacang tanah	Lahan ada Petani ada
	4.2.12	Belum adanya Bantuan bibit unggul tanaman jagung	Lahan ada Petani ada
	4.2.13	Belum adanya bantuan bibit unggul tanaman padi	Lahan ada Petani ada
	4.2.14	Belum adanya Subsidi Benih Penangkar Tanaman Padi	Lahan ada Petani ada
	4.2.15	11. Kurang Tersedianya Bibit Sapi Penggemukkan	Kelompok Ternak ada
	4.2.16	Rusaknya JIDES dan JITUT	Kelompok Tani ada
	4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	
	4.3.01	Masih belum pahamnya wali nagari jalam menjalankan roda pemerintahan	Pemerintahan ada
	4.3.02	Masih kurangnya pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan tingkat pelayanan	Perangkat ada
	4.3.03	Masih belum maksimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan [embangunan nagari	Perangkat ada
	4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	
	4.4.01	Kurangnya keikut sertaan perempuan dalam meningkatkan pembangunan nagari	Lembaga ada



		4.4.02	Masih adanya anak-anak terlantar dan jadi korban kejahatan/kriminal	Lembaga ada
		4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
		4.5.01	Kelembagagaan koperasi kurang tertatata dengan baik	Kelompok SPP Ada
		4.5.02	Kelembagaan Koperasi kurang di minati masyarakat	Ada
		4.5.03	Kurangnya terlatih masyarakat dalam menjalankan unit usaha	Sumbar daya alam ada masyarakat ada
		4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
		4.6.02	Kelembagaan badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) kurang diminati masyarakat	Masyarakat ada
		4,6,01	Kurangnya Pemahaman Pengurus BUMNAG Tentang Laporan dan Pengelolaan	Bumnag Ada, Pengurus Ada
		4.6.03	Masih belum adanya teknologi tepat guna	Pengurus ada
		4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
		4.7.02	Pasar Tidak Ada di Nagari sehingga Kegiatan Ekonomi Harus Ke Nagari Lain	Produksi Komoditas Pertanian Tinggi
		5	<u>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari</u>	
		5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
		5.1.01	Tidak adanya bantuan dan alat-alat perlengkapan Evakuasi Bencana	Bahan Ada, Tempat Penjual Ada
		5.1.02	Tidak adanya penanganan Pra Bencana, Sedang Bencana dan Pasca bencana	Rawan Bencana, tenaga ada



		5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	
		5.2.01	Tidak adanya Alat Transportasi Tanggap Darurat	Lokasi ada, Alat ada
		5.2.02	Tidak adanya sembako	Tenaga ada,Bahan ada
		5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	
		5.3.01	Runtuh / Rusak prasarana Masyarakat akibat bencana	Tenaga ada, Alat dan Bahan ada

3.1.2. Pengkajian Keadaan Nagari Menggunakan Kalender Musim

Tabel 3.10 Kalender Musim

Kegiatan/ Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
A. Iklim												
▪ Hujan	⚡	⚡						⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
▪ Kemarau			☀	☀☀		☀	☀					
B. Pengolahan lahan												
▪ Tanam	Δ							Δ			Δ	Δ
▪ Panen		òó	òó									òó
▪ Pacaklik				×	×	×	×					
▪ Hama penyakit	Ö							Ö			Ö	Ö
▪ Pemasaran hasil pertanian		√	√					√			√	√

Keterangan Gambar Kalender Musim

- ⚡ = Hujan
- ☀ = Kemarau
- Δ = Tanam
- òó = Panen
- × = Pacaklik
- Ö = Hama Penyakit
- √ = Pemasaran Hasil Pertanian

X	=	Sedikit
XX	=	Sedang
XXX	=	Sering/Kebanyakan



Daftar Masalah dan Potensi Pengkajian Keadaan Nagari Menggunakan Kalender Musim Nagari
AUR DURI SURANTIH

Tabel. 3.11 Pengkajian Kampung Timbulun dan Pasir Nan Panjang

No	Kampung	Musim	Kegiatan	Masalah	Potensi
1	Timbulun	<u>Hujan</u>	<u>Tanam Padi</u>	Bibit padi unggul susah didapat	Lahan Ada Petani Ada
				Gagal Semai	Curah Hujan Tinggi
				Sering terjadi banjir disaat hari hujan	Curah Hujan Tinggi
			<u>Pasca Panen</u>	Tidak bisa bercocok tanam	Curah Hujan Tinggi
			<u>Pemberantasan Hama</u>	Banyak terjangkit penyakit Demam Berdarah	Curah Hujan Tinggi
				Jalan Becek	Curah Hujan Tinggi
		KEMARAU		Kurangnya Air Bersih Masyarakat	Sumur ada
			<u>Pecaklik</u>	Banyaknya Pengangguran	Kemiskinan
			<u>Tanam</u>	1. Air Irigasi Tidak Memadai 2. Kurang benih padi unggul 3. Harga pupuk mahal 4. Banyak ternak warga yang lepas	Gagal Panen Hasil Panen Menurun Hasil Panen Menurun Hasil Panen Menurun



				dan merusak padi yang baru ditanam	
				5. Keringnya lahan pertanian	Paceklik
				6. Kurangnya Obat Pengendalian Hama Perusak Tanaman	Hasil Panen Menurun
			<u>Panen</u>	1. Harga jual – beli yang murah	Peteni Rugi
				2. Hasil panen sedikit	Peteni Rugi
				3. Upah yang mahal	Peteni Rugi
			<u>Pemasaran Hasil Perkebunan</u>	1. Susahnya tempat pemasaran	Harga Sawit Murah
				2. Tidak adanya Perusahaan Pengelolaan Sawit	Harga Sawit Murah
			<u>Peceklik</u>	1. Harga kebutuhan pokok mahal	Kemiskinan
				2. Ekonomi penduduk makin merosot	Kemiskinan
				3. Pelayanan kesehatan sangat sedikit dan harga obat mahal	Kemiskinan
				4. Kurangnya rasa ukhuwa islamiah	Kemiskinan



2	Pasir Nan Panjang	<u>HUJAN</u>		Sering terjadi banjir disaat hari hujan	Curah Hujan Tinggi
			<u>Tanam</u>	Tidak bisa bercocok tanam	Curah Hujan Tinggi
			<u>Pemberantasan Hama</u>	Banyak terjangkit penyakit Demam Berdarah	Curah Hujan Tinggi
				Jalan Becek	Curah Hujan Tinggi
		<u>KEMARAU</u>		1. Kurangnya Air Bersih Masyarakat	Sumur ada
			<u>Pasca Panen</u>	2. Keringnya lahan pertanian	Paceklik
			<u>Peceklik</u>	Banyaknya Penganguran	Kemiskinan
			<u>Tanam</u>	1. Kurang benih padi unggul	Hasil Panen Menurun
				2. Harga pupuk mahal	Hasil Panen Menurun
				3. Banyak ternak warga yang lepas dan merusak padi yang baru ditanam	Hasil Panen Menurun
				4. Kurangnya Obat Pengendalian Hama Perusak Tanaman	Hasil Panen Menurun
				5. Air Irigasi Tidak	Gagal



				Memadai	Panen
			<u>Panen</u>	1. Harga jual – beli yang murah	Peteni Rugi
				2. Hasil panen sedikit	Peteni Rugi
				3. Upah yang mahal	Peteni Rugi
			Pemasaran Hasil Kebun	1. Susahnya tempat pemasaran	Harga Sawit Murah
				2. Tidak adanya Perusahaan Pengolahan Sawit	Harga Sawit Murah
			<u>Peceklik</u>	1. Harga kebutuhan pokok mahal	Kemiskinan
				2. Ekonomi penduduk makin merosot	Kemiskinan
				3. Pelayanan kesehatan sangat sedikit dan harga obat mahal	Kemiskinan
				4. Kurangnya rasa ukhuwa islamiah	Kemiskinan

3.1.3. Pengkajian Keadaan Nagari Menggunakan Bagan Kelembagaan

Diagram kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peranan (manfaat) lembaga bagi masyarakat dan juga sebagai alat untuk menggali masalah yang berhubungan dengan peranan (manfaat) lembaga bagi masyarakat.

Lembaga didesa adalah sekumpulan orang atau profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

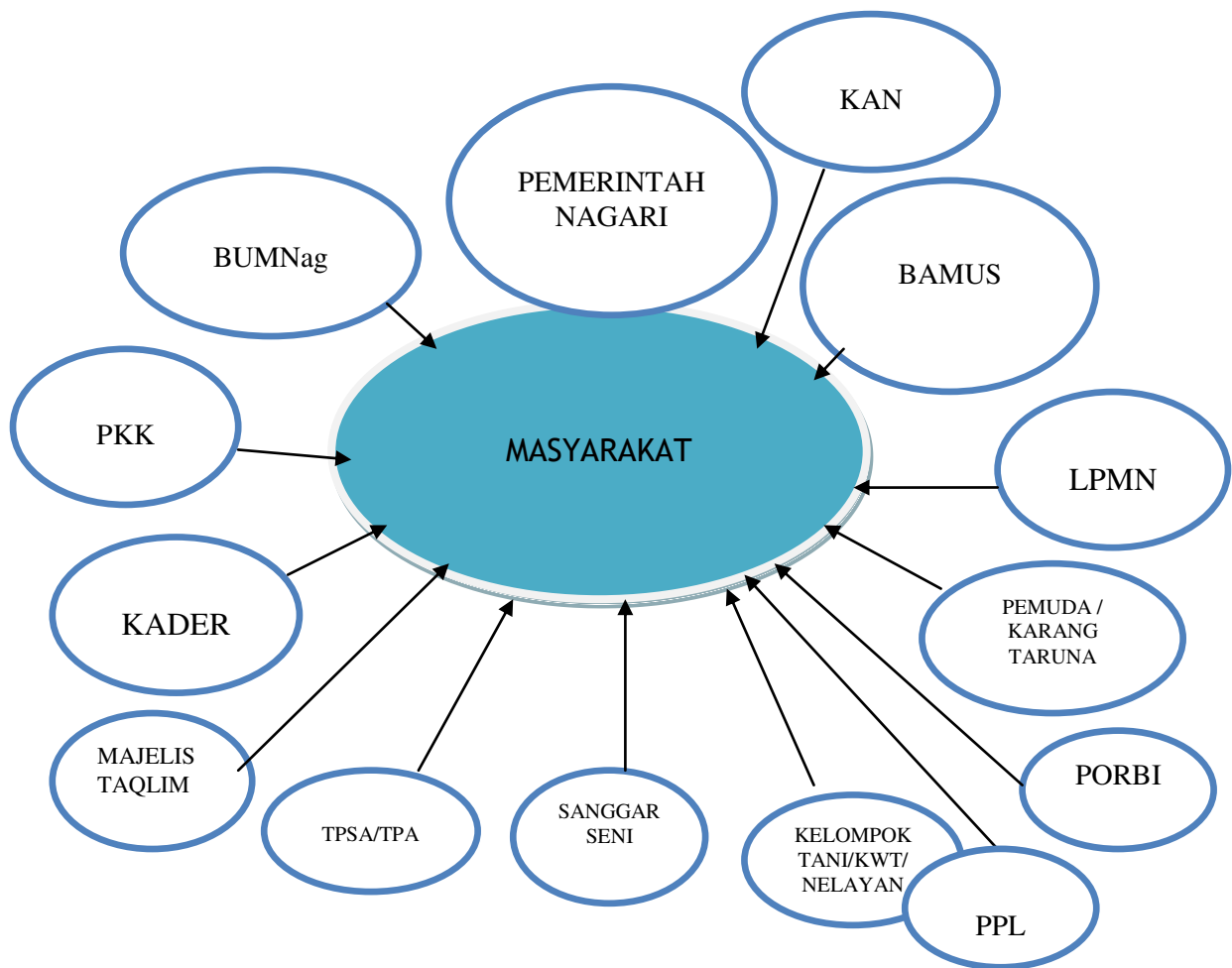
Pengkajian keadaan nagari menggunakan bagan kelembagaan dilakukan dengan cara :

Tim penyusun RPJMNag telah melakukan identifikasi kelembagaan yang ada dinagari Aur Duri Surantih Melalui rembuk Kampung / Penggalan gagasan sebagai Berikut :

- 1) Pemerintah Nagari
- 2) Bamus
- 3) LPMN
- 4) PKK
- 5) KAN
- 6) BUMNag
- 7) Pemuda / Karang Taruna
- 8) Kader
- 9) Kelompok Tani / Kelompok Wanita Tani / Nelayan
- 10) Majelis Taklim
- 11) Porbi
- 12) TPA / TPSA
- 13) Sanggar Seni
- 14) PPL

Setelah dilakukan identifikasi kelembagaan oleh Tim RPJMNag menyampaikan kepada peserta Musyawara tentang dampak dan hubungan dapat disimpulkan bahwa besar atau kecil lingkaran dan jauh atau dekatnya menggambarkan kondisi hubungan antar kelembagaan, Pemerintah Nagari dengan masyarakat.

Digram Venn



Gambar : 3.4 Diagram Venn / Kelembagaan

Manfaat masing-masing lembaga di Nagari Aur Duri Surantih antara lain :

1. Pemerintahan Nagari memiliki manfaat yang sangat penting dalam pelayanan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah sebagai lembaga yang mengayomi dan memfasilitasi baik fisik maupun non fisik / baik formal maupun non formal.
2. BAMUS memiliki manfaat sebagai penyampaian dan pembahasan aspirasi masyarakat kepada pemerintah nagari dalam musyawara perencanaan pembangunan.
3. BUMNag memiliki manfaat sebagai lembaga yang dapat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat salah satunya sebagai penunjang usaha masyarakat.
4. LPMN memiliki manfaat sebagai lembaga yang membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan nagari serta penyampaian pelaksanaan

pembangunan kepada masyarakat, disamping itu LPMN juga berperan sebagai lembaga yang menggali potensi nagari untuk disampaikan kepada Bamus dan Pemerintah Nagari.

5. Kader memiliki manfaat sebagai pembantu lembaga, juga dapat melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta membantu perencanaan pembangunan
6. KAN memiliki manfaat sebagai peran niniak mamak dalam mempertahankan adat istiadat dan budaya serta membantu pemerintah dalam permasalahan sengketa tanah ulayat.
7. Karang Taruna memiliki manfaat sebagai tenaga kerja sosial masyarakat dalam membantu roda pemerintahan dan keamanan dan ketentraman masyarakat.
8. PKK memiliki manfaat untuk memfasilitasi program-program kaum perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga
9. Majelis Taqlim memiliki manfaat untuk memotifasi kaum perempuan dalam kegiatan – kegiatan dibidang keagamaan.
10. TPA / TPSA memiliki manfaat sebagai pendidik dan menumbuh kembangkan agama dari usia dini.
11. Sanggar Seni memiliki manfaat sebagai pengembangan seni dan budayaan serta mengurangi kenakalan remaja dalam lingkungan masyarakat.
12. Kelompok Tani memiliki manfaat sebagai penunjang ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.
13. PPL memiliki manfaat sebagai penggerak kelompok tani dalam meningkatkan produksi hasil pertanian.
14. Porbi memiliki manfaat sebagai pembasmi hama pada tanaman masyarakat.



Masalah dan Potensi Pengkajian Keadaan Nagari Menggunakan Bagan Kelembagaan
Kampung Pasir Nan Panjang

Tabel. 3.12 Pengkajian Diagram Venn Kampung Pasir Nan Panjang

NO	KAMPUNG	MASALAH	POTENSI
2	Pasir Nan Panjang	I. <u>Pemerintahan Nagari</u>	
		1. Belum Maksimalnya Pelayanan Pemerintahan Kepada Masyarakat	Pemerintahan Nagari Ada
		2. Kurangnya Pengetahuan Aparatur Nagari	Tingginya Kemauan Belajar
		3. Anggaran Nagari Belum Berimbang	Semangat Kerja Tinggi
		I. <u>BAMUS</u>	
		1. BAMUS kurang dekat dengan Masyarakat	Tersedianya waktu
		2. Kurang biaya Transportasi	Ada dana DAUN
		3. Kurangnya Pengetahuan BAMUS tentang nagari	Adanya Tamatan Sarjana
		4. Fungsi Kewenangan Belum Terlaksana Secara Maksimal	Sumber Daya Manusia Ada
		5. Kurang Lengkapnya Peraturan Nagari	BAMUS ada
		II. <u>BUMNag</u>	
		1. Tidak adanya sarana dan prasarana BUMNag	
		2. Kapasitas pengurus BUMNag dalam pengembangan masih belum maksimal	
		3. Kurangnya penguatan modal	
		II. <u>LPMN</u>	
		1. Kurangnya Pengetahuan LPMN tentang potensi nagari	Adanya Tamatan Sarjana
		2. Tidak adanya biaya Transportasi	Ada dana DAUN



		3. Kurang mengetahui Tupoksi LPMN	Tersedianya Buku Petunjuk
		4. LPMN kurang dekat dengan Masyarakat	Tersedianya waktu
		IV. <u>KADER</u>	
		1. Kurangnya Kemampuan untuk Fasilitasi masyarakat	Adanya Tamatan Sarjana
		2. Kurangnya dana untuk transportasi	Ada Dana DOK
		3. Kurangnya keinginan untuk membangun kampung	Banyak SDM
		V. <u>KAN</u>	
		1. Kurangnya Kesejahteraan KAN	Pengurus KAN ada
		2. Kegiatan KAN tidak aktif.	KAN ada
		VI. <u>Karang Taruna</u>	
		1. Bidang Kesenian Tradisional Kurang Berkembang	Alat ada,Pemain ada
		2. Kreatifitas Anak Di Bidang Kesenian Modern Masih Kurang	Anak ada
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga danpembinaan yang Kurang Memadai	Sumber Daya ada, Tenaga Pembina Tersedia
		VII. <u>PKK</u>	
		1. Kurangnya Kesejahteraan Kader PKK	Kader ada, PKK ada
		2. Kegiatan PKK tidak aktif.	PKK ada
		3. Kurangnya Biaya Operasional	Bisa beriyuran
		VIII. <u>Majelis Taqlim</u>	
		1. Tidak adanya Biaya Operasional	iyuran ada
		2. Sulitnya unutk mengadakan perkumpulan	Kelompok ada
		3. Kurang mendapat perhatian dari pemerintah	Lembaga Ada, pemerintahan ada



		4. Kurangnya Perlengkapan Majelis Taqlim	Majelis Taqlim ada
		IX. TPA / TPSA	
		1. Belum adanya gedung TPA / TPSA	Lahan ada, guru ada, murid ada
		2. Sarana dan prasaranan belum memadai	Lembaga ada, murid ada
		3. Kurangnya kesejahteraan guru	Guru ada
		X. Sanggar Seni	
		1. Kuirangnyan sarana dan prasarana yang dimiliki kelompok sanggar	Kelompo ada, anggota ada, murid ada
		2. Kesejahteraan guru pembina belum ada	Guru ada, kelompok sanggar ada
		3. Kapasitas pengurus belum mencukupi.	Pengurus ada
		XI. Kelompok Tani / KWT / Nelayan	
		1. Kurangnya SDM kelompok tani	Kelompok ada, penyuluh ada
		2. Belum tercapainya produksi yang maksimal	Kelompok ada, penyuluh ada
		3. Belum adanya pengutan modal	Kelompok ada, pengurus ada
		XII. PPL	
		1. Kurangnya Kemampuan untuk Fasilitasi masyarakat	Adanya Tamatan Sarjana
		2. Kurangnya dana untuk transportasi	Ada Dana APBD
		3. Kurangnya keinginan kelompok untuk pertemuan	Banyak SDM
		XIII. Porbi	
		1. Belum adanya oprasional untuk melaksanakan kegiatan	Kelompok porbi ada
		2. Kurangnya peralatan yang digunakan	Kelompok porbi ada



Masalah dan Potensi Pengkajian Keadaan Nagari Menggunakan Bagan Kelembagaan Kampung Timbulun

Tabel. 3.13 Pengkajian Diagram Venn Kampung Timbulun

NO	KAMPUNG	MASALAH	POTENSI
1	Timbulun	I. <u>Pemerintahan Nagari</u>	
		1. Belum Maksimalnya Pelayanan Pemerintahan Kepada Masyarakat	Pemerintahan Nagari Ada
		2. Kurangnya Pengetahuan Aparatur Nagari	Tingginya Kemauan Belajar
		3. Anggaran Nagari Belum Berimbang	Semangat Kerja Tinggi
		II. <u>BAMUS</u>	
		1. BAMUS kurang dekat dengan Masyarakat	Tersedianya waktu
		2. Kurang biaya Transportasi	Ada dana DAUN
		3. Kurangnya Pengetahuan BAMUS tentang nagari	Adanya Tamatan Sarjana
		4. Fungsi Kewenangan Belum Terlaksana Secara Maksimal	Sumber Daya Manusia Ada
		5. Kurang Lengkapnya Peraturan Nagari	BAMUS ada
		III. <u>BUMNag</u>	
		1. Tidak adanya sarana dan prasarana BUMNag	
		2. Kapasitas pengurus BUMNag dalam pengembangan masih belum maksimal	
		3. Kurangnya penguatan modal	
		IV. <u>LPMN</u>	
		1. Kurangnya Pengetahuan LPMN tentang potensi nagari	Adanya Tamatan Sarjana
		2. Tidak adanya biaya Transportasi	Ada dana DAUN



		3. Kurang mengetahui Tupoksi LPMN	Tersedianya Buku Petunjuk
		4. LPMN kurang dekat dengan Masyarakat	Tersedianya waktu
		V. <u>KADER</u>	
		1. Kurangnya Kemampuan untuk Fasilitas masyarakat	Adanya Tamatan Sarjana
		2. Kurangnya dana untuk transportasi	Ada Dana DOK
		3. Kurangnya keinginan untuk membangun kampung	Banyak SDM
		VI. <u>KAN</u>	
		1. Kurangnya Kesejahteraan KAN	Pengurus KAN ada
		2. Kegiatan KAN tidak aktif.	KAN ada
		VII. <u>Karang Taruna</u>	
		1. Bidang Kesenian Tradisional Kurang Berkembang	Alat ada,Pemain ada
		2. Kreatifitas Anak Di Bidang Kesenian Modern Masih Kurang	Anak ada
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga danpembinaan yang Kurang Memadai	Sumber Daya ada, Tenaga Pembina Tersedia
		VIII. <u>PKK</u>	
		1. Kurangnya Kesejahteraan Kader PKK	Kader ada, PKK ada
		2. Kegiatan PKK tidak aktif.	PKK ada
		3. Kurangnya Biaya Operasional	Bisa beriyuran
		IX. <u>Majelis Taqlim</u>	
		1. Tidak adanya Biaya Operasional	iyuran ada
		2. Sulitnya unutk mengadakan perkumpulan	Kelompok ada
		3. Kurang mendapat perhatian dari	Lembaga Ada,



		pemerintah	pemerintahan ada
		4. Kurangnya Perlengkapan Majelis Taqlim	Majelis Taqlim ada
		X. <u>TPA / TPSA</u>	
		1. Belum adanya gedung TPA / TPSA	Lahan ada, guru ada, murid ada
		2. Sarana dan prasarana belum memadai	Lembaga ada, murid ada
		3. Kurangnya kesejahteraan guru	Guru ada
		XI. <u>Sanggar Seni</u>	
		1. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki kelompok sanggar	Kelompok ada, anggota ada, murid ada
		2. Kesejahteraan guru pembina belum ada	Guru ada, kelompok sanggar ada
		3. Kapasitas pengurus belum mencukupi.	Pengurus ada
		XII. <u>Kelompok Tani / KWT / Nelayan</u>	
		1. Kurangnya SDM kelompok tani	Kelompok ada, penyuluh ada
		2. Belum tercapainya produksi yang maksimal	Kelompok ada, penyuluh ada
		3. Belum adanya pengutan modal	Kelompok ada, pengurus ada
		XIII. <u>PPL</u>	
		1. Kurangnya Kemampuan untuk Fasilitas masyarakat	Adanya Tamatan Sarjana
		2. Kurangnya dana untuk transportasi	Ada Dana APBD
		3. Kurangnya keinginan kelompok untuk pertemuan	Banyak SDM



		4. Porbi	Kelompok porbi ada
		5. Belum adanya oprasional untuk melaksanakan kegiatan	Kelompok porbi ada
		6. Kurangnya peralatan yang digunakan	Kelompok porbi ada

3.1.4. Pengelompokan Masalah

Penggabungan semua masalah dari Sketsa Nagari, kalender musim dan bagan kelembagaan sesuai bidang dan mencari tindakan yang layak. Adapun Tujuan dari pengkajian tindakan pemecahan masalah adalah :

- 1. Mengetahui penyebab masalah mendesak
- 2. Mengetahui potensi yang akan memecahkan penyebab masalah secara tepat
- 3. Memilih tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah

Pengkajian tindakan pemecahan masalah dilakukan dalam beberapa langkah – langkah sebagai berikut :

- 1. Mengurangi masalah untuk mencari penyebab-penyebabnya
- 2. Mengurangi potensi yang dapat mendukung pemecahan penyebab masalah
- 3. Membandingkan masalah serta penyebabnya dengan potensi yang tersedia
- 4. Menghitung dan mempertimbangkan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah
- 5. Memilih kegiatan yang dianggap paling dapat memecahkan masalah.



Tabel. 3.14 Pengelompokan Masalah

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Pemecahan	Tindakan Yang Layak/Kegiatan
1	<u>Bidang Pemerintahan</u>				
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari (Maksimal 30% kegiatan 1-7)				
1.1.01	Kesejahteraan Wali Nagari masih kurang memadai	Anggaran terbatas	Sumber daya manusia ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari
1.1.02	Kurangnya Kesejahteraan perangkat Nagari	Anggaran terbatas	Sumber daya manusia ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari
1.1.03	Masih belum memadainya jaminan sosial kepala Desa dan perangkat	Anggaran terbatas	Sumber daya manusia ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyediaan jaminan sosial bagi wali nagari dan perangkat
1.1.04	operasional pemerintah desa tidak memadai	Anggaran terbatas	Sumber daya manusia ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyediaan operasional pemerintahan nagari
1.1.05	Masih kurangnya penyediaan tunjangan BPD/BAMUS	Anggaran terbatas	Sumber daya manusia ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyediaan tunjangan BPD/ BAMUS
1.1.06	Belum memadainya operasional	Anggaran terbatas	Sumber daya	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3	- Penyediaan operasional



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

	BPD/BAMUS		manusia ada	- Dianggarkan pada APB Nagari	BPD/BAMUS
1.1.07	Masih kurangnya penyediaan insentif serta oprasinal kepala kampung	Anggaran terbatas	Sumber daya manusia ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyediaan penghasilan tetap kepala kampung
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasaranan Pemerintahan Nagari				
1.2.01	Sarana perkantoran masih belum memadai	Anggaran terbatas	Perangkat Nagari ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyediaan sarana sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1.2.02	Belum adanya pemeliharaan gedung kantor	Anggaran terbatas	Gedung Ada, Perangkat ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pemeliharaan gedung/prasaranan kantor Wali Nagari
1.2.03	Gedung pelayanan belum maksimal	Anggaran terbatas	Perangkat Nagari ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Rehabilitas, peningkatan gedung Kantor Nagari
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1.3.01	Belum adanya pelayanan berbarbasis IT	Anggaran terbatas	Lembaga ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan dan pelatihan pelayanan berbasis IT
1.3.02	Belum lengkapnya profil desa	Anggaran terbatas	Perangkat nagari ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pendataan penduduk
1.3.03	Tidak adanya pengelolaan administrasi	Anggaran terbatas	Tenaga ada, jaringan ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyediaan operasional pengelolaan administrasi
1.3.04	Kurangnya pengetahuan masyarakat	Anggaran terbatas	Lokasi ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3	- Penyuluhan kepada



	tentang kependudukan dan pencatatan sipil			- Dianggarkan pada APB Nagari	masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
1.3.05	Belum adanya analisis kemiskinan desa secara partisipatif	Anggaran terbatas	Lokasi ada, bahan ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Melakukan pemetaan dan analisis kemiskinan Nagari secara Partisipatif
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.01	Masih kurangnya biaya pelaksanaan musyawarah	Anggaran terbatas	Sumber daya manusia ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyelenggaraan musyawara perencanaan Nagari/pembahasan APBNag
1.4.03 -04	Kurangnya anggaran dalam kegiatan perencanaan Nagari, musyawarah Nagari lainnya dan dokumen perencanaan Nagari serta keuangan Nagari	Anggaran terbatas	Sumber daya manusia ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyediaan operasional kegiatan penyusunan dokumen perencanaan nagarai - Penyediaan operasional kegiatan penyusunan dokumen keuangan Nagari
1.4.05	Belum adanya pengelolaan asset Nagari	Anggaran terbatas	Sumber daya manusia ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyediaan operasional Inventaris aset nagari



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

1.4.06	Belum maksimalnya penyusunan kebijakan nagari	Anggaran terbatas	Sumber daya manusia ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyediaan operasonal penyusunan kebijakan nagari
1.4.07	Belum maksimalnya laporan wali nagari	Anggaran terbatas	Sumber daya manusia ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyediaan operasional Penyusunan laporan nagari/penyelenggaraan pemerintahan nagari
1.4.08	Belum optimalnya sisitem informasi Nagari	Anggaran terbatas	Sumber daya manusia ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan Pengembangan sistem informasi nagri
1.4.11	Belum adanya kegiatan lomba Nagari	Anggaran terbatas	Sumber daya manusia ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyelenggaraan kegiatan lomba nagari
1.4.12	Belum adanya peringatan hari jadi Nagari	Anggaran terbatas	Sumber daya manusia ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyelenggaraan kegiatan peringatan hari jadi nagari
2	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari</u>				
2.1	Sub Bidang Pendidikan				
2.1.01	Kurangnya kesejahteraan guru PAUD /TK/MDA	Anggaran terbatas	Guru ada, Murid Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyediaan insentif guru Paud/TK/MDA
2.1.06	Kurangnya pembangunan/rehabilitas/ peningkatan / pengadaan sarana/prasarana dan mobiler PONPES,	Anggaran tidak mencukupi	Komite sekolah, Gedung ada,	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Kegiatan pembangunan Wc rumah tangga miskin nagari



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

	MTsM, SD, TK/PAUD, TPQ/MDTQ		Murid Ada		- Kegiatan rehap gedung SD - Kegiatan pembangunan gedung MDA nagari - Kegiatan pembangunan kantor TK/Paud nagari - Kegiatan pembangunan RTLH nagari
2.1.07	Tidak adanya taman baca Nagari	Anggaran tidak mencukupi	Siswa dan guru ada /tanah ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Kegiatan pembangunan Pustaka nagari - Kegiatan pembangunan Sagar Belajar nagari
2.1.09	Belum adanya kegiatan pembinaan sanggar seni	Anggaran tidak mencukupi	Pondok Pesantren ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembinaan Sangar Seni Nagari
2.1.10	Belum adanya dukungan pendidikan bagi keluarga miskin	Anggaran tidak mencukupi	Ruang Belajar SD ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan Program Beasiswa Berprestasi bagi siswa miskin
2.1.11	Tidak Tersedia Alat Kesenian (Drumben)	Anggaran tidak mencukupi	Guru Ada, Murid Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan alat-alat kesenian nagari
2.2	Sub Bidang Kesehatan				
2.2.01	Masih kurang memadainya pelayanan dan penyelenggaraan Kesehatan	Anggaran tidak mencukupi	Lahan, Material,Tena	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembangunan Pagar POSKESRI nagari



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

	(POSKESRI dan PKD)		ga Kesehatan ada		- Pengadaan alat-alat Kesehatan POSKESRI nagari - Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepi bagi kerluarga miskin - Pembangunan dan rehap POSKESRI nagari
2.2.02	Belum mencukupinya penyelenggaraan posyandu	Anggaran tidak mencukupi	Kader ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Insentif Kader Yandu nagari - Pelatihan Kader yandu nagari - Pembangunan dan Perlengkapan POSYANDU nagari - Pemberian makanan tambahan
2.2.03	Masih kurangnya kapasitas penyuluh dan kader kesehatan	Anggaran tidak mencukupi	Kader ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyuluhan dan pelatihan kader kesehatan nagari
2.2.04	Nagari siaga belum berjalan optimal	Anggaran tidak mencukupi	Kader ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Insentif UKK Tani - Insentif Kader nagari Siaga - Pelatihan Kader nagari



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

					Siaga
2.2.06	Bina Keluarga Balita tidak berjalan optimal	Anggaran tidak mencukupi	Kader ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Insentif kader BKB nagari - Pelatihan kader BKB nagari
2.2.08	sarana dan prasarana posyandu, polindes, PKD belum terpelihara dengan baik	Anggaran tidak mencukupi	Kader ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Perlengkapan POSYANDU nagari
2.2.09	Belum optimalnya dan memadai pelayanan posyandu/pokesri/PKD	Anggaran tidak mencukupi	Kader ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penambahan tenaga kesehatan nagari
2.2.10	Kurang Layaknya Jambanisasi Keluarga	Anggaran tidak mencukupi	Lahan ada, RTM Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembangunan WC untuk masyarakat miskin nagari
2.2.11	Kurang Tersedianya Air Bersih	Anggaran tidak mencukupi	PDAM Ada, Lahan Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembangunan Sumber air Bersih nagari
2.2.12	Kurangnya Insentif Kader Yandu	Anggaran terbatas	Kader ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penambahan insentif kader yandu
2.2.13	Perlunya diadakan pelatihan peningkatan kapasitas kader KB	Anggaran tidak mencukupi	Kader Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pelatihan kader KB
2.2.14	Belum adanya pemasangan Implan yang baik	Anggaran tidak mencukupi	Kader Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan alat implan
2.2.15	Kurang Memadai Perlengkapan Medis POSKESRI	Anggaran tidak mencukupi	Tenaga Ada, Poskesri ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan perlengkapan alat medis poskesri
2.2.16	Perlunya Peningkatan Gizi anak dan Ibu	Anggaran tidak	Anak dan Ibu	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3	- Pengadaan makanan



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

	Hamil	mencukupi	Hamil ada	- Dianggarkan pada APB Nagari	tambahan untuk belita dan ibu hamil
2.2.17	Perlunya Jaminan Kesehatan Ibu Hamil dan RTM	Anggaran tidak mencukupi	Ibu Hamil dan RTM ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan BPJS untuk rumah tangga miskin - Pengadaan JAMPERSAL untuk ibu hamil
2.2.18	Tidak Tersedianya AMBULANCE	Anggaran tidak mencukupi	Tenaga ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan ambulance
2.2.19	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang DBD	Anggaran tidak mencukupi	RTM Banyak	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Sosialisasi / penyuluhan tentang DBD
2.2.20	Kurangnya JAMKESMAS dan JAMKESDA	Anggaran terbatas	RTM Banyak	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pengadaan JAMKESMAS dan JAMKESDA
2.2.21	Pagar Poskesri Tidak Ada	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Gedung Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembangunan pagar poskesri
2.2.22	Pelayanan Posyandu tidak Optimal karena gedung Belum Ada	Anggaran tidak mencukupi	Kader Ada, Lahan Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembangunan gedung posyandu
2.2.23	Kurang Layaknya Bangunan Poskesri	Anggaran tidak mencukupi	Tenaga Medis Ada, Lahan Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Rehap bangunan poskesri
2.2.24	Kurangnya Kesejahteraan Kader UKK Tani	Anggaran terbatas	Tenaga Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Insentif kader UKK tani



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2.3.01	Jalan Nagari belum terpelihara dengan baik	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembangunan jalan nagari
2.3.02	Jalan lingkungan pemukiman belum terpelihara dengan baik	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembangunan jalan pemukiman nagari
2.3.03	Belum adanya pemeliharaan jalan usaha tani	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pemeliharaan jalan usaha tani nagari
2.3.04	Pemeliharaan jembatan Nagari belum optimal	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembangunan jembatan nagari
2.3.05	Prasarana jalan Nagari belum terpelihara dengan baik	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penambahan tenaga pemeliharaan jalan nagari - Pembangunan drenase nagari
2.3.06	Belum terpeliharanya balai kemasyarakatan	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penjaga kantor nagari - OB nagari
2.3.07	Tidak adanya pemeliharaan pemakaman milik desa / situs bersejarah / patilasan	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Insentif Satpam Pemakaman nagari
2.3.09	Batas desa belum terpelihara dengan baik	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Rehap gapura batas nagari



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

2.3.10	Jalan Berlobang, becek sulit ditempuh kendaraan	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Peningkatan dan pengerasan jalan nagari
2.3.11	Akses Jalan lingkung pemukiman masih kurang memadai	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- peningkatan pengerasan jalan lingkung pemukiman nagari
2.3.12	Tidak Lancarnya Akses Transportasi Hasil Pertanian	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Peningkatan dan pengersan jalan usaha tani nagari
2.3.13	Tidak ada Jembatan Permanen Penghubung	Anggaran terbatas	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pembangunan jembatan nagari
2.3.14	Masih belum meratanya prasarana jalan Nagari	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Peningkatan prasarana jalan nagari
2.3.15	Belum adanya pembangunan situs bersejarah milik Nagari	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembangunan gedung sejarah nagari
2.3.16	Sulitnya Menempuh Jalan Ke Pandam Kuburan	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Peningkatan jalan pemakaman nagari
2.3.17	Peta wilaya dan peta sosial Nagari belum optimal	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pemutahiran peta wilayah dan sosial nagari
2.3.19	Kurang Layaknya Air bersi untuk Kebutuhan Rumah Tangga	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembangunan embung mini - Pembangunan Sumur



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

					BOR
2.3.20	Gapura pembatas Nagari belum ada	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembangunan gapura nagari
2.3.21	Tidak Tercapainya Jangka waktu yang Cepat Ke Tempat Evakuasi Tsunami	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembuatan jalan evakuasi tsunami nagari
2.3.22	Kurangnya Pengaman Tebing	Anggaran terbatas	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pembangunan batu jeti - Pembangunan bronjong nagari
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman				
2.4.01	Masih adanya rumah tidak layak huni	Anggran terbatas.	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pembangunan rumah tidak layak huni - Rehap dapur masyarakat
2.4.02	Masih banyaknya terdapat genangan air	Anggaran terbatas	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pembangunan drenase nagari
2.4.03	Sumber air bersih belum terpelihara dengan baik	Anggaran terbatas	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pemeliharaan bendungan mini nagari - Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga
2.4.04	Masih adanya rumah tangga yang	Anggaran terbatas	Lahan Ada,	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3	- Penyambungan pipa air



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

	belum tersalurkan air bersih		Material ada	- Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	bersih kerumah tangga
2.4.05	Sanitasi lingkungan masih belum terpelihara dengan baik	Anggrann tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pemeliharaan saluran selokan
2.4.06	Masih banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki jambannisasi	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	-pembangunan wc untuk rumah tangga miskin - pembangunan WC umum
2.4.07	Sampah belum terkelolah dengan baik	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pemeliharaan bak sampah - Menbuat penampungan sampah dipemukiman masyarakat
2.4.08	Belum adanya tempat pembuangan air limbah dan limbah rumah tangga	Anggran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pemeliharaan air limbah rumah tangga - upah untuk pemeliharaan air limbah rumah tangga



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

2.4.09	Belum lengkapnya tempat bermain anak	Anggran terbatas	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Penjaga taman bermain anak - Rehap taman bermain anak
2.4.10	Masih banyaknya genangan air didepan pemukiman masyarakat	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pembangunan saluran air
2.4.11	Masih banyaknya rumah tangga yang belum dialiri air bersih	Anggran terbatas	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pembangunan sumur bor
2.4.12	Masih belum adanya sambungan air bersih kerumah tangga	Anggran terbatas	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Penyambungan pipa air bersih kerumah tangga
2.4.13	Masih belum meratanya sanitasi pemukiman	Anggran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Peningkatan saluran parit pemukiman masyarakat
2.4.14	Masih bnyaknya rumah tangga yang belum memiliki jamban umum	Anggaran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pembuatan WC untuk rumah tangga miskin
2.4.15	Masih belum adanya tempat	Anggran tidak	Lahan Ada,	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3	- Pembangunan bank



	pembuangan sampah	mencukupi	Material ada	- Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	sampah di pemungkiman masyarakat
2.4.16	Masih belum adanya tempat pembuangan limbah	Anggran terbatas	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pembangunan tempat pembuangan air limbah rumah tangga - Peningkatan drainase
2.4.17	Belum adanya tempat bermain anak yang layak	Anggran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pembangunan taman bermain anak milik nagari
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup				
2.5.01	Hutan belum terkelolah dengan baik	Anggran terbatas	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pengelolaan hutan milik nagari
2.5.02	Lingkungan hidup belum terkelolah dengan baik	Anggran terbatas	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengelolaan lingkungan hidup nagari - Penanaman pohon lindung
2.5.03	Masih banyaknya masyarakat yang belum paham dalam mengelolah dan	Anggran terbatas	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Sosialisasi penyadaran tentang lingkungan hidup



	menjaga hutan dan lingkungan hidup			- Dianggarkan pada APBD dan APBN	dan kehutanan
2.5.04	Belum adanya penghijauan pekarangan Rumah (SAO)	Anggran terbatas	Lahan ada Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Penanaman pohon plindung - Penanaman bunga - Penanaman sayur
2.5.05	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang BIOGAS dan KOMPOS	Anggran terbatas	Lahan ada Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD	- Penyuluhan tentang biogas dan kompos
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				
2.6.01	Belum adanya rambu-rambu jalan	Anggran terbatas	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pembuatan rambu-rambu di jalan nagari
2.6.02	Masih kurangnya informasi publik	Anggran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembuatan baliho informasi untuk masyarakat
2.6.03	Belum adanya jaringan informasi lokal	Anggran tidak mencukupi	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembuatan jaringan komunikasi dan informasi lokal nagari



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

2.6.04	Sulitnya Menginformasikan kepada Masyarakat Tentang Penggunaan Dana Nagari	Anggran tidak mencukupi	Lahan Ada, material Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Membuat baliho tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				
2.7.02	Belum adanya energy alternative tingkat Nagari	Anggaran terbatas	Lahan Ada, Material ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat nagari
2.8	Sub Bidang Pariwisata				
2.8.02	Belum Termanfaatkan Kawasan Wisata	Anggran tidak mencukupi	Lahan Ada, Pengunjung Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari - Dianggarkan pada APBD dan APBN	- Pembangunan tempat wisata nagari
3	<u>Bidang Pembinaan Masyarakat Nagari Nagari</u>				
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
3.1.01	Belum adanya pos keamanan	Anggran tidak mencukupi	Pengurus Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembangunan poskamling nagari - Membentuk hansip nagari



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

3.1.02	Kurangnya Pengetahuan Linmas Tentang Tugas	Anggran tidak mencukupi	Pengurus Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pelatihan satlinmas nagari
3.1.03	Belum adanya keamanan masyarakat berskala lokal nagari	Anggran tidak mencukupi	Pengurus Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Membuat jadwal piket ronda
3.1.04	Pelaksanaan Kegiatan bencana skala lokalnagari belum ada	Anggran tidak mencukupi	Pengurus Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pelatihan nagari tanggap bencana
3.1.05	Tidak Adanya Fasilitas Linmas	Anggran tidak mencukupi	Pengurus Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan perlengkapan linmas
3.1.06	Kurangnya Kesadaran aparaturnagari dan Masyarakat Tentang Hukum	Anggran tidak mencukupi	SDM Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Membentuk badan perlindungan hukum untuk masyarakat miskin - Bantuan hukum untuk masyarakat miskin
3.1.07	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang hukum	Anggran tidak mencukupi	Pengurus Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat
3.1.08	Kurangnya Kesejahteraan Linmas	Anggran tidak mencukupi	Pengurus Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Insentif untuk satlinmas
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				
3.2.01	Belum maksimalnya pembinaan	Anggran tidak	Nagari Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3	- Pembinaan dan pelatihan



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

	terhadap grub kesenian dan kebudayaan	mencukupi		- Dianggarkan pada APB Nagari	grub kesenian dan kebudayaan nagari
3.2.03	Tidak adanya Iven Antar Nagari	Anggran tidak mencukupi	Nagari Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Mengadakan penyelenggaraan lomba kesenian,kebudayaan dan hari besar nasional di tingkat nagari
3.2.04	Kurangnya penjagaan atas aset kesenian , kebudayaan dan keagamaan	Anggran tidak mencukupi	Pengurus Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembentukan petugas penjagaan atasaset kesenian
3.2.05	Belum memadainya sarana dan prasarana kesenian, kebudayaan dan keagamaan	Anggran tidak mencukupi	Pengurus Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan alat-alat kesenian - Pembangunan rumah adat
3.2.06	Kurangnya SDM Tentang HUT RI	Anggran tidak mencukupi	SDM Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Sosialisasi tentang HUT RI
3.2.07	Kurangnya Kesejahteraan Imam Khotib dan Bilal	Anggran belum ada	SDM ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Insentif imam khotib dan bilal
3.2.08	Langkahnya Alat Kesenian Daerah	Anggran tidak mencukupi	Sanggar Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan alat-alat kesenian
3.2.09	Kurangnya Pelatihan tentang Budaya Minang Kabau	Anggran tidak mencukupi	SDM Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pelatihan tentang budaya adat minang kabau



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

3.3	Sub Bidang Kepemudaan Olah Raga				
3.3.02	Kurangnya Semangat Pemuda dengan Olah Raga	Anggran tidak mencukupi	SDM Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
3.3.03	Tidak Adanya Kegiatan Iven Pemuda Nagari	Anggran tidak mencukupi	Pemuda Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan lomba olahraga tingkat nagari
3.3.06	Kurangnya SDM Pemuda	Anggran tidak mencukupi	Pemuda Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pelatihan pemuda nagari
3.3.05	Pelaksanaan Kegiatan Pemuda Belum Semua Berjalan	Anggran tidak mencukupi	Pengurus Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pembangunan sarana olahraga nagari
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				
3.4.03	Kurangnya Pemahaman Tentang Kegiatan PKK	Anggran tidak mencukupi	Pengurus Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Sosialisasi tentang PKK kepada masyarakat nagari
3.4.05	Kegiatan PKK Nagari Belum Semuanya Berjalan	Anggran tidak mencukupi	Pengurus Ada, Lahan Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan dana untuk penunjang kegiatan PKK nagari
3.4.01	Belum Adanya Pelatihan Adat	Anggran tidak mencukupi	SDM Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pelatihan adat nagari
3.4.02	Kurangnya Pemahaman Tentang Kegiatan LPMN	Anggran tidak mencukupi	Pengurus Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Sosialisai tentang kegiatan LPMN nagari



3.4.04	Kurangnya Pemahaman Tentang Nagari SIAGA	Anggran tidak mencukupi	Pengurus Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Sosialisasi tentang nagari siaga
4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari</u>				
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan				
4.1.03	Belum Adanya Keramba Jaring Apung	Anggran tidak mencukupi	Lahan Ada, Kelompok Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari, APBD	- Pengadaan keramba jaring apung
4.1.05	Tidak Tersedianya Bibit Ikan	Anggran tidak mencukupi	Lahan Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari dan APBD	- Pengadaan bibit ikan
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				
4,2,01	Masih kurangnya produksi tanaman pangan	Anggran terbatas	Tenaga ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari dan APBD	- Peningkatan produksi tanaman pangan - Pengadaan alat pengolahan pertanian - Pengadaan alat pengilingan padi
4.2.02	Masih kurangnya produksi peternakan	Anggran terbatas	Lahan Ada, Kelompok	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan bibit unnggul - Pengadaan pupuk subsidi



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

			Ada	dan APBD	- Pengadaan kompos
4.2.03	Masih kurangnya embung padi	Anggran terbatas	Lahan Ada, Kelompok Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari dan APBD	- Pembangunan lumbung padi
4.2.05	Kurangnya pengetahuan petani dalam pengolahan tanaman Cabe	Anggran terbatas	Lahan ada Petani ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari dan APBD	- Pelatihan petani dalam pengolahan cabe - Studi banding kelompok tani
4.2.06	Banyaknya hama yang menyerang Tanaman Masyarakat	Anggran terbatas	Tenaga ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari dan APBD	- Pengadaan pemberantas hama tanaman
4.2.07	Bibit Unggul tidak tersedia	Anggran terbatas	Lahan sawah ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari dan APBD	- Pengadaan bantuan bibit unggul
4.2.08	Mahalnya Pupuk An Organik	Anggran terbatas	Lahan ada Petani ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari dan APBD	- Pengadaan pupuk bersubsidi
4.2.09	Belun adanya bibit unggul Sawit	Anggran terbatas	Lahan ada Petani ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagaridan APBD	- Pengadaan bibit unggul sawit
4.2.10	Kurang Tersediannya Benih Pokok Tanaman Padi	Anggran terbatas	Lahan ada Petani ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari dan APBD	- Pengadaan beni padi



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

4.2.11	Belum adanya bantuan bibit unggul tanaman kacang tanah	Anggran terbatas	Lahan ada Petani ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari dan APBD	- Pengadaan bibit kacang tanah
4.2.12	Belum adanya Bantuan bibit unggul tanaman jagung	Anggran terbatas	Lahan ada Petani ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari dan APBD	- Pengadaan bibit jagung
4.2.13	Belum adanya bantuan bibit unggul tanaman padi	Anggran terbatas	Lahan ada Petani ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari dan APBD	- Pengadaan bibit unggul tanaman padi
4.2.14	Belum adanya Subsidi Benih Penangkar Tanaman Padi	Anggran terbatas	Lahan ada Petani ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari dan APBD	- Pengadaan subsidi benih penangkar tanaman padi
4.2.15	Kurang Tersedianya Bibit Sapi Penggemukkan	Anggran terbatas	Kelompok Ternak ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari dan APBD	- Pengadaan bibit sapi pengemukan
4.2.16	Rusaknya JIDES dan JITUT	Anggran terbatas	Kelompok Tani ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari dan APBD	- Peninkatan JIDES dan JITUT
4,3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari				
4.3.01	Masih belum pahamnya wali nagari dalam menjalankan roda pemerintahan	Anggran tidak mencukupi	Pemerintahan ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari dan APBD	- Peningkatan kapasitas wali nagari



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

4.3.02	Masih kurangnya pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan tingkat pelayanan	Anggran tidak mencukupi	Perangkat ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Peningkatan kapasitas perangkat nagari
4.3.03	Masih belum maksimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan nagari	Anggran tidak mencukupi	Lembaga ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Peningkatan pengawasan TPK nagari
4,4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan				
4.4.01	Kurangnya keikutsertaan perempuan dalam meningkatkan pembangunan nagari	Anggran tidak mencukupi	Lembaga ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Diikutsertakan perempuan dalam meningkatkan pembangunan nagari
4.4.02	Masih adanya anak-anak terlantar dan jadi korban kejahatan/kriminal	Anggran tidak mencukupi	Lembaga ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Sosialisasi tentang kejahatan / kriminal - Sosialisai tentang penyakit masyarakat - Sosialisai tentang narkoba - Sosialisasi tentang kenakalan remaja
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah				
4.5.01	Kelembagaan koperasi kurang tertata dengan baik	Anggran tidak mencukupi	Kelompok SPP Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan simpan pinjam - Prngadaan koperasi



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

4.5.02	Kelembagaan Koperasi kurang diminati masyarakat	Anggran tidak mencukupi	Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari	- Pengadaan produk unggulan
4.5.03	Kurangnya terlatih masyarakat dalam menjalankan unit usaha	Anggran tidak mencukupi	Sumbar daya alam ada masyarakat ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APBNagari	- Pelatihan tentang usaha mikro kecil dan menengah
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal				
4.6.02	Kelembagaan badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) kurang diminati masyarakat	Anggran tidak mencukupi	Masyarakat ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari, APBD dan APBN	- Promosi BUMNag di tengah masyarakat
4,6,01	Kurangnya Pemahaman Pengurus BUMNAG Tentang Laporan dan Pengelolaan	Anggran tidak mencukupi	Bumnag Ada, Pengurus Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari, APBD dan APBN	- Pelatihan pengurus BUMNag
4.6.03	Masih belum adanya teknologi tepat guna	Anggran tidak mencukupi	Bumnag ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APB Nagari, APBD dan APBN	- Pengadaan bantuan alat untuk usaha home industri rumah tangga
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian				
4.7.02	Pasar Tidak Ada di Nagari sehingga Kegiatan Ekonomi Harus Ke Nagari Lain	Anggran tidak mencukupi	Produksi Komoditas Pertanian	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APBNagari	- Pembangunan pasar nagari



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

			Tinggi		
5	<u>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari</u>				
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
5.1.01	Tidak adanya bantuan dan alat-alat perlengkapan Evakuasi Bencana	Anggran tidak mencukupi	Bahan Ada, Tempat Penjual Ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APBNagari	- Pengdaan alat-alat perlengkapan Evakuasi Bencana
5.1.02	Tidak adanya penanganan Pra Bencana, Sedang Bencana dan Pasca bencana	Anggran tidak mencukupi	Rawan Bencana, tenaga ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APBNagari	- Sosialisasi tentang penangulangan bencana
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat				
5.2.01	Tidak adanya Alat Transportasi Tanggap Darurat	Anggran tidak mencukupi	Lokasi ada, Alat ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APBNagari	- Pengadaan alat transportasi tanggap darurat
5.2.02	Tidak adanya sembako	Anggran tidak mencukupi	Tenaga ada, Bahan ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APBNagari	- Pengadaan sembako untuk tanggap bencana
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak				
5.3.01	Runtuh / Rusak prasarana Masyarakat akibat bencana	Anggran tidak mencukupi	Tenaga ada, Alat dan Bahan ada	- Mencari Sumber Dana Pihak Ke 3 - Dianggarkan pada APBNagari	- Pengadaan tenda pengungsian - Pengadaan dapur umum



Tabel. 3.15 Penentuan Peringkat Masalah

No	Masalah	Potensi	Dirasakan Oleh Banyak Orang	Sangat Parah	Menghambat Peningk. Pendapatan	Sering Terjadi	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan	Jumlah Nilai	Urutan Peringkat
1	<u>Bidang Pemerintahan</u>								
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari (Maksimal 30% kegiatan 1-7)								
1.1.01	Kesejahteraan Wali Nagari masih kurang memadai	Sumber daya manusia ada	6	8	9	8	9	40	5
1.1.02	Kurangnya Kesejahteraan perangkat Nagari	Sumber daya manusia ada	7	9	9	7	9	41	4
1.1.03	Masih belum memadainya jaminan sosial kepala Desa dan perangkat	Sumber daya manusia ada	8	9	7	7	9	40	5
1.1.04	operasional pemerintah desa tidak memadai	Sumber daya manusia ada	9	9	9	8	9	44	1
1.1.05	Masih kurangnya penyediaan tunjangan BPD/BAMUS	Sumber daya manusia ada	7	9	9	7	9	40	5
1.1.06	Belum memadainya operasional BPD/BAMUS	Sumber daya manusia ada	8	8	8	8	8	40	5



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

1.1.07	Masih kurangnya penyediaan insentif serta operasinol kepala kampung	Sumber daya manusia ada	5	9	6	7	9	36	9
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasaranan Pemerintahan Nagari								
1.2.01	Sarana perkantoran masih belum memadai	Perangkat Nagari ada	9	7	5	8	8	38	7
1.2.02	Belum adanya pemeliharaan gedung kantor	Gedung Ada, Perangkat ada	9	7	8	5	8	37	8
1.2.03	Gedung pelayanan belum maksimal	Perangkat Nagari ada	9	6	4	4	9	32	13
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan								
1.3.01	Belum adanya pelayanan berbarbasis IT	Lembaga ada	9	9	8	4	8	38	7
1.3.02	Belum lengkapnya profil desa	Perangkat nagari ada	7	6	4	4	9	30	15
1.3.03	Tidak adanya pengelolaan administrasi	Tenaga ada, jaringan ada	8	7	5	7	8	35	10
1.3.04	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kependudukan	Lokasi ada	9	4	4	7	9	33	12



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

	dan pencatatan sipil								
1.3.05	Belum adanya analisis kemiskinan desa secara partisipatif	Lokasi ada, bahan ada	8	5	4	8	8	33	12
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan								
1.4.01	Masih kurangnya biaya pelaksanaan musyawarah	Sumber daya manusia ada	9	4	9	4	8	34	11
1.4.03-04	Kurangnya anggaran dalam kegiatan perencanaan Nagari, musyawarah Nagari lainnya dan dokumen perencanaan Nagari serta keuangan Nagari	Sumber daya manusia ada	5	9	4	8	8	34	11
1.4.05	Belum adanya pengelolaan asset Nagari	Sumber daya manusia ada	7	8	8	9	8	40	5
1.4.06	Belum maksimalnya penyusunan kebijakan nagari	Sumber daya manusia ada	5	4	5	4	9	27	18
1.4.07	Belum maksimalnya laporan wali nagari	Sumber daya manusia ada	8	5	4	4	8	29	16
1.4.08	Belum optimalnya sisitem informasi Nagari	Sumber daya manusia ada	6	4	4	7	8	29	16
1.4.11	Belum adanya kegiatan lomba Nagari	Sumber daya manusia ada	9	4	4	8	8	33	12



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

1.4.12	Belum adanya peringatan hari jadi Nagari	Sumber daya manusia ada	8	4	4	4	8	28	17
2	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari</u>								
2.1	Sub Bidang Pendidikan								
2.1.01	Kurangnya kesejahteraan guru PAUD /TK/MDA	Guru ada, Murid Ada	9	7	9	5	8	38	7
2.1.06	Kurangnya pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana dan mobiler PONPES, MTsM, SD, TK/PAUD, TPQ/MDTQ	Komite sekolah, Gedung ada, Murid Ada	9	9	4	8	8	38	7
2.1.07	Tidak adanya taman baca Nagari	Siswa dan guru ada /tanah ada	7	4	4	4	8	27	18
2.1.09	Belum adanya kegiatan pembinaan sanggar seni	Pondok Pesantren ada	8	4	4	8	8	32	13
2.1.10	Belum adanya dukungan pendidikan bagi keluarga miskin	Ruang Belajar SD ada	7	8	6	9	8	38	7
2.1.11	Tidak Tersedia Alat Kesenian (Drumben)	Guru Ada, Murid Ada	6	6	6	4	8	30	15
2.2	Sub Bidang Kesehatan								
2.2.01	Masih kurang memadainya	Lahan,	9	4	4	9	8	34	11



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

	pelayanan dan penyelenggaraan Kesehatan (POSKESRI dan PKD)	Material, Tenaga Kesehatan ada							
2.2.02	Belum mencukupinya penyelenggaraan posyandu	Kader ada	9	7	7	8	9	40	5
2.2.03	Masih kurangnya kapasitas penyuluh dan kader kesehatan	Kader ada	7	4	4	4	9	28	17
2.2.04	Nagari siaga belum berjalan optimal	Kader ada	7	7	4	4	9	31	14
2.2.06	Bina Keluarga Balita tidak berjalan optimal	Kader ada	8	7	5	5	7	32	13
2.2.08	sarana dan prasarana posyandu, polindes, PKD belum terpelihara dengan baik	Kader ada	9	8	4	9	6	36	9
2.2.09	Belum optimalnya dan memadai pelayanan posyandu/pokesri/PKD	Kader ada	9	7	4	4	7	31	14
2.2.10	Kurang Layaknya Jambanisasi Keluarga	Lahan ada, RTM Ada	7	9	4	8	8	36	9
2.2.11	Kurang Tersedianya Air Bersih	PDAM Ada, Lahan Ada	9	8	8	5	6	36	9
2.2.12	Kurangnya Insentif Kader Yandu	Kader ada	7	4	4	8	7	30	15
2.2.13	Perlunya diadakan pelatihan peningkatan kapasitas kader KB	Kader Ada	7	9	4	7	7	34	11



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

2.2.14	Belum adanya pemasangan Implan yang baik	Kader Ada	6	5	5	8	8	32	13
2.2.15	Kurang Memadai Perlengkapan Medis POSKESRI	Tenaga Ada, Poskesri ada	9	8	6	8	8	39	6
2.2.16	Perlunya Peningkatan Gizi anak dan Ibu Hamil	Anak dan Ibu Hamil ada	7	8	5	8	8	32	13
2.2.17	Perlunya Jaminan Kesehatan Ibu Hamil dan RTM	Ibu Hamil dan RTM ada	7	7	5	8	8	35	10
2.2.18	Tidak Tersedianya AMBULANCE	Tenaga ada	9	8	4	8	8	37	8
2.2.19	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang DBD	RTM Banyak	9	4	5	7	7	32	13
2.2.20	Kurangnya JAMKESMAS dan JAMKESDA	RTM Banyak	7	8	5	8	8	36	9
2.2.21	Pagar Poskesri Tidak Ada	Lahan Ada, Gedung Ada	7	7	6	5	8	33	12
2.2.22	Pelayanan Posyandu tidak Optimal karena gedung Belum Ada	Kader Ada, Lahan Ada	7	6	4	7	8	32	13
2.2.23	Kurang Layaknya Bangunan Poskesri	Tenaga Medis Ada, Lahan Ada	8	6	4	5	8	31	14
2.2.24	Kurangnya Kesejahteraan Kader UKK Tani	Tenaga Ada	5	7	5	6	8	31	14



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2.3.01	Jalan Nagari belum terpelihara dengan baik	Lahan Ada, Material ada	9	8	8	8	9	42	3
2.3.02	Jalan lingkungan pemukiman belum terpelihara dengan baik	Lahan Ada, Material ada	8	7	7	8	8	38	7
2.3.03	Belum adanya pemeliharaan jalan usaha tani	Lahan Ada, Material ada	9	9	9	8	9	44	1
2.3.04	Pemeliharaan jembatan Nagari belum optimal	Lahan Ada, Material ada	8	7	7	6	9	37	8
2.3.05	Prasarana jalan Nagari belum terpelihara dengan baik	Lahan Ada, Material ada	8	6	7	6	7	34	11
2.3.06	Belum terpeliharanya balai kemasyarakatan	Lahan Ada, Material ada	7	6	5	5	6	27	18
2.3.07	Tidak adanya pemeliharaan pemakaman milik desa / situs bersejarah / patilasan	Lahan Ada, Material ada	7	7	4	5	8	31	14
2.3.09	Batas desa belum terpelihara dengan baik	Lahan Ada, Material ada	7	6	4	4	7	29	16
2.3.10	Jalan Berlobang, becek sulit ditempuh kendaraan	Lahan Ada, Material ada	8	8	9	6	7	39	6



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

2.3.11	Akses Jalan lingkung pemukiman masih kurang memadai	Lahan Ada, Material ada	7	7	7	7	7	35	10
2.3.12	Tidak Lancarnya Akses Transportasi Hasil Pertanian	Lahan Ada, Material ada	8	8	9	7	8	40	5
2.3.13	Tidak ada Jembatan Permanen Penghubung	Lahan Ada, Material ada	9	7	8	7	7	38	7
2.3.14	Masih belum meratanya prasarana jalan Nagari	Lahan Ada, Material ada	7	6	7	8	6	34	11
2.3.15	Belum adanya pembangunan situs bersejarah milik Nagari	Lahan Ada, Material ada	5	4	4	4	6	23	22
2.3.16	Sulitnya Menempuh Jalan Ke Pandam Kuburan	Lahan Ada, Material ada	8	7	5	8	7	35	10
2.3.17	Peta wilaya dan peta sosial Nagari belum optimal	Lahan Ada, Material ada	6	5	4	7	7	29	16
2.3.19	Kurang Layaknya Air bersi untuk Kebutuhan Rumah Tangga	Lahan Ada, Material ada	8	7	6	6	6	33	12
2.3.20	Gapura pembatas Nagari belum ada	Lahan Ada, Material ada	8	7	4	6	8	33	12
2.3.21	Tidak Tercapainya Jangka waktu yang Cepat Ke Tempat Evakuasi Tsunami	Lahan Ada, Material ada	8	8	5	5	8	34	11
2.3.22	Kurangnya Pengaman Tebing	Lahan Ada, Material ada	8	9	7	8	8	40	5



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman								
2.4.01	Masih adanya rumah tidak layak huni	Lahan Ada, Material ada	7	6	4	7	7	31	14
2.4.02	Masih banyaknya terdapat genangan air	Lahan Ada, Material ada	6	8	6	8	7	35	10
2.4.03	Sumber air bersih belum terpelihara dengan baik	Lahan Ada, Material ada	8	6	5	7	7	33	12
2.4.04	Masih adanya rumah tangga yang belum tersalurkan air bersih	Lahan Ada, Material ada	6	6	8	7	7	34	11
2.4.05	Sanitasi lingkungan masih belum terpelihara dengan baik	Lahan Ada, Material ada	7	7	4	8	7	33	12
2.4.06	Masih banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki jambannisasi	Lahan Ada, Material ada	8	8	4	7	7	34	11
2.4.07	Sampah belum terkelolah dengan baik	Lahan Ada, Material ada	8	7	5	6	6	32	13
2.4.08	Belum adanya tempat pembuangan air limbah dan limbah rumah tangga	Lahan Ada, Material ada	7	6	5	5	6	29	16
2.4.09	Belum lengkapnya tempat bermain anak	Lahan Ada, Material ada	8	7	7	8	8	38	7
2.4.10	Masih banyaknya genangan air didepan pemukiman masyarakat	Lahan Ada, Material ada	7	6	5	6	7	31	14



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

2.4.11	Masih banyaknya rumah tangga yang belum dialiri air bersih	Lahan Ada, Material ada	7	7	7	7	6	34	11
2.4.12	Masih belum adanya sambungan air bersih kerumah tangga	Lahan Ada, Material ada	7	6	7	7	8	35	10
2.4.13	Masih belum meratanya sanitasi pemukiman	Lahan Ada, Material ada	8	7	6	6	8	35	10
2.4.14	Masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki jamban umum	Lahan Ada, Material ada	5	5	4	4	4	22	23
2.4.15	Masih belum adanya tempat pembuangan sampah	Lahan Ada, Material ada	8	8	5	7	7	35	10
2.4.16	Masih belum adanya tempat pembuangan limbah	Lahan Ada, Material ada	8	6	4	6	6	30	15
2.4.17	Belum adanya tempat bermain anak yang layak	Lahan Ada, Material ada	7	8	5	7	8	35	10
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
2.5.01	Hutan belum terkelolah dengan baik	Lahan Ada, Material ada	5	4	4	4	5	22	23
2.5.02	Lingkungan hidup belum terkelolah dengan baik	Lahan Ada, Material ada	6	5	5	4	6	26	19
2.5.03	Masih banyaknya masyarakat yang	Lahan Ada,	6	5	5	7	6	29	16



	belum paham dalam mengelolah dan menjaga hutan dan lingkungan hidup	Material ada							
2.5.04	Belum adanya penghijauan pekarangan Rumah (SAO)	Lahan ada Material ada	7	6	7	5	6	31	14
2.5.05	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang BIOGAS dan KOMPOS	Lahan ada Material ada	8	7	8	6	6	35	10
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika								
2.6.01	Belum adanya rambu-rambu jalan	Lahan Ada, Material ada	8	6	4	4	6	28	17
2.6.02	Masih kurangnya informasi publik	Lahan Ada, Material ada	6	5	6	6	7	30	15
2.6.03	Belum adanya jaringan informasi lokal	Lahan Ada, Material ada	5	4	4	5	6	24	21
2.6.04	Sulitnya Menginformasikan kepada Masyarakat Tentang Penggunaan Dana Nagari	Lahan Ada, material Ada	7	5	5	7	6	30	15



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral								
2.7.02	Belum adanya energy alternative tingkat Nagari	Lahan Ada, Material ada	7	6	5	5	7	30	15
2.8	Sub Bidang Pariwisata								
2.8.02	Belum Termanfaatkan Kawasan Wisata	Lahan Ada, Pengunjung Ada	6	7	7	4	7	31	14
3	<u>Bidang Pembinaan Masyarakat Nagari Nagari</u>								
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
3.1.01	Belum adanya pos keamanan	Pengurus Ada	8	7	5	7	8	35	10
3.1.02	Kurangnya Pengetahuan Linmas Tentang Tugas	Pengurus Ada	6	5	5	4	7	27	18
3.1.03	Belum adanya keamanan masyarakat berskala lokal nagari	Pengurus Ada	7	5	4	4	6	26	19
3.1.04	Pelaksanaan Kegiatan bencana skala lokalnagari belum ada	Pengurus Ada	7	7	6	4	5	29	16
3.1.05	Tidak Adanya Fasilitas Linmas	Pengurus Ada	8	6	4	6	6	30	15
3.1.06	Kurangnya Kesadaran aparatur	SDM Ada	8	7	5	7	7	34	11



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

	nagari dan Masyarakat Tentang Hukum								
3.1.07	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang hukum	Pengurus Ada	7	5	7	4	5	28	17
3.1.08	Kurangnya Kesejahteraan Linmas	Pengurus Ada	7	5	6	5	7	30	15
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan								
3.2.01	Belum maksimalnya pembinaan terhadap grub kesenian dan kebudayaan	Nagari Ada	7	6	4	6	6	29	16
3.2.03	Tidak adanya Iven Antar Nagari	Nagari Ada	6	5	4	4	5	24	21
3.2.04	Kurangnya penjagaan atas aset kesenian , kebudayaan dan keagamaan	Pengurus Ada	6	7	5	4	6	28	17
3.2.05	Belum memadainya sarana dan prasarana kesenian, kebudayaan dan keagamaan	Pengurus Ada	7	4	4	5	6	26	19
3.2.06	Kurangnya SDM Tentang HUT RI	SDM Ada	7	5	6	5	6	23	22
3.2.07	Kurangnya Kesejahteraan Imam Khotib dan Bilal	SDM ada	8	7	6	6	7	33	12
3.2.08	Langkahnya Alat Kesenian Daerah	Sanggar Ada	6	4	4	5	5	24	21



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

3.2.09	Kurangnya Pelatihan tentang Budaya Minang Kabau	SDM Ada	8	7	5	6	7	33	12
3.3	Sub Bidang Kepemudaan Olah Raga								
3.3.02	Kurangnya Semangat Pemuda dengan Olah Raga	SDM Ada	7	5	4	7	7	30	15
3.3.03	Tidak Adanya Kegiatan Iven Pemuda Nagari	Pemuda Ada	7	4	4	4	8	27	18
3.3.06	Kurangnya SDM Pemuda	Pemuda Ada	7	7	6	7	8	35	10
3.3.05	Pelaksanaan Kegiatan Pemuda Belum Semua Berjalan	Pengurus Ada	7	7	6	7	8	35	10
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat								
3.4.03	Kurangnya Pemahaman Tentang Kegiatan PKK	Pengurus Ada	7	6	7	7	8	35	10
3.4.05	Kegiatan PKK Nagari Belum Semuanya Berjalan	Pengurus Ada, Lahan Ada	7	6	6	8	8	35	10
3.4.01	Belum Adanya Pelatihan Adat	SDM Ada	7	6	4	6	7	30	15



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

3.4.02	Kurangnya Pemahaman Tentang Kegiatan LPMN	Pengurus Ada	7	5	4	6	7	29	16
3.4.04	Kurangnya Pemahaman Tentang Nagari SIAGA	Pengurus Ada	9	6	4	7	8	34	11
4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari</u>								
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan								
4.1.03	Belum Adanya Keramba Jaring Apung	Lahan Ada, Kelompok Ada	6	6	7	7	8	34	11
4.1.05	Tidak Tersedianya Bibit Ikan	Lahan Ada	6	6	7	7	8	34	11
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan								
4.2.01	Masih kurangnya produksi tanaman pangan	Tenaga ada	8	7	8	7	8	38	7
4.2.02	Masih kurangnya produksi peternakan	Lahan Ada, Kelompok Ada	7	7	8	7	8	37	8
4.2.03	Masih kurangnya embung padi	Lahan Ada, Kelompok Ada	7	6	7	6	7	33	12
4.2.05	Kurangnya pengetahuan petani dalam pengolahan tanaman Cabe	Lahan ada Petani ada	7	6	7	6	7	33	12



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

4.2.06	Banyaknya hama yang menyerang Tanaman Masyarakat	Tenaga ada	9	7	9	6	8	39	6
4.2.07	Bibit Unggul tidak tersedia	Lahan sawah ada	9	5	8	6	8	36	9
4.2.08	Mahalnya Pupuk An Organik	Lahan ada Petani ada	8	8	9	7	7	39	6
4.2.09	Belum adanya bibit unggul Sawit	Lahan ada Petani ada	8	6	8	7	8	37	8
4.2.10	Kurang Tersediannya Benih Pokok Tanaman Padi	Lahan ada Petani ada	7	7	8	6	7	35	10
4.2.11	Belum adanya bantuan bibit unggul tanaman kacang tanah	Lahan ada Petani ada	6	6	7	4	6	29	16
4.2.12	Belum adanya Bantuan bibit unggul tanaman jagung	Lahan ada Petani ada	6	5	6	4	5	26	19
4.2.13	Belum adanya bantuan bibit unggul tanaman padi	Lahan ada Petani ada	9	8	9	7	8	42	3
4.2.14	Belum adanya Subsidi Benih Penangkar Tanaman Padi	Lahan ada Petani ada	6	6	8	5	7	32	13
4.2.15	Kurang Tersedianya Bibit Sapi Penggemukkan	Kelompok Ternak ada	7	5	8	6	6	32	13
4.2.16	Rusaknya JIDES dan JITUT	Kelompok Tani ada	8	7	8	8	8	39	6



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

4,3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari								
4.3.01	Masih belum pahamnya wali nagari dalam menjalankan roda pemerintahan	Pemerintahan ada	9	5	7	8	8	37	8
4.3.02	Masih kurangnya pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan tingkat pelayanan	Perangkat ada	9	6	5	8	8	36	9
4.3.03	Masih belum maksimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan nagari	Lembaga ada	7	7	5	7	8	34	11
4,4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan								
4.4.01	Kurangnya keikut sertaan perempuan dalam meningkatkan pembangunan nagari	Lembaga ada	7	6	5	7	8	33	12
4.4.02	Masih adanya anak-anak terlantar dan jadi korban kejahatan/kriminal	Lembaga ada	8	5	5	4	8	30	15
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah								
4.5.01	Kelembagaan koperasi kurang tertata dengan baik	Kelompok SPP Ada	7	5	7	8	6	33	12
4.5.02	Kelembagaan Koperasi kurang di	Ada	6	5	6	5	6	28	17



PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH

	minati masyarakat								
4.5.03	Kurangnya terlatih masyarakat dalam menjalankan unit usaha	Sumbar daya alam ada masyarakat ada	7	5	7	4	7	30	15
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal								
4.6.02	Kelembagaan badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) kurang diminati masyarakat	Masyarakat ada	8	7	8	7	6	36	9
4,6,01	Kurangnya Pemahaman Pengurus BUMNAG Tentang Laporan dan Pengelolaan	Bumnag Ada, Pengurus Ada	7	8	8	7	8	38	7
4.6.03	Masih belum adanya teknologi tepat guna	Bumnag ada, SDM ada	8	5	8	6	8	35	10
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian								
4.7.02	Pasar Tidak Ada di Nagari sehingga Kegiatan Ekonomi Harus Ke Nagari Lain	Produksi Komoditas Pertanian Tinggi	9	8	8	7	8	40	5



5	<u>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari</u>								
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana								
5.1.01	Tidak adanya bantuan dan alat-alat perlengkapan Evakuasi Bencana	Bahan Ada, Tempat Penjual Ada	9	8	9	8	5	39	6
5.1.02	Tidak adanya penanganan Pra Bencana, Sedang Bencana dan Pasca bencana	Rawan Bencana, tenaga ada	9	8	8	8	8	41	4
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat								
5.2.01	Tidak adanya Alat Transportasi Tanggap Darurat	Lokasi ada, Alat ada	8	8	7	7	8	38	7
5.2.02	Tidak adanya sembako	Tenaga ada, Bahan ada	9	8	7	8	9	41	4
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak								
5.3.01	Runtuh / Rusak prasarana Masyarakat akibat bencana	Tenaga ada, Alat dan Bahan ada	9	8	8	8	8	41	4

3.2. Musyawarah Nagari RPJM Nagari

A. Penyusunan RPJM

Penyusunan RPJMNag di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di NagariAur Duri Surantih dengan menggunakan dengan Alat pada :

1. Sketsa nagari
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah kampung yang telah dilakukan pada :

- | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Pasir NanPanjang | Rabu ,25Juni 2018 | SD 24 Surantih |
| 2 | Timbulun | Senin, 23 Juni 2018 | Balitmas Nagari ADS |

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat kampung, Kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3

B. Lokakarya Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakrarya ditingkat Nagari yang dilaksanakan tanggal 07Agustus 2018 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah masalah dari hasil musyawarah Nagari,
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Nagari
3. Menyusun Visi - Misi Nagari
4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak yang layak untuk memecahkan masalah yang ada.

C. Musrenbang RPJMNag

Berdasar hasil lokakarya Nagari selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah pembangunan Nagari yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 dan musrenbang Nagari akan dilaksanakan pada Selasa 21 Agustus 2018

Berkaitan dengan fasilitasi pembuatan dokumen RPJMNag AUR DURI SURANTIH merupakan kebutuhan yang mendesak terutama proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, demokratis dan setara. Sehingga dokumen RPJMNag tersebut mendapat dukungan dan legalitas dari semua unsur masyarakat.

Nagari Aur Duri Surantih, kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 12 Nagari di kecamatan Sutera yang mempunyai jarak 42 Km dari kota kabupaten. Kecamatan Sutera sendiri merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori kecamatan miskin. Secara geografis Nagari Aur Duri Surantih sendiri terletak di perbatasan sebelah barat Nagari Surantih - utara Nagari Rawang Gunung Malelo- timur Nagari Koto Nan Tigo Selatan dan selatan berbatasan Nagari Amping Parak. tanahnya adalah dataran rendah , dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan sehingga sebagian besar masyarakat Nagari adalah petani/pekebun.

Nagari Aur Duri Surantih terdiri dari 2 Kampung , dengan potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Wali Nagari, Satu Orang Sekretaris, Dua orang Kasi, Dua Orang Kaur, Satu Orang Bendahara, Dua Orang Staf Nagari dan 2 orang Wali Kampung, mempunyai jumlah penduduk 6.146 orang yang terdiri dari 3.030 orang laki-laki, 3.116 orang perempuan, dan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 415 RTM.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMNag)

1. Tujuan penyusunan RPJMNag adalah:

- a. Merumuskan rencana pembangunan nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat
- b. Merumuskan arah, tujuan. kebijakan dan strategi pembangunan Nagari
- c. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat di Nagari dalam proses pembangunan.

2. Prinsip Penyusunan RPJMNag

- a. Lengkap artinya RPJMNag mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan Nagari
- b. Cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya
- c. Sistematis artinya RPJMNag disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut
- d. Partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan
- e. Keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJMNag

3. Kaidah Penyusunan RPJMNag

- a. RPJMNag sebagai Proses Pemikiran Strategis
- b. RPJMNag sebagai Rangkaian Kegiatan yang Sistematis

4. Tim Penyusun RPJMNag

Jumlah anggota Tim Penyusun sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:

- a. Wali Nagari
- b. Sekretaris Nagari
- c. 1 (satu) orang Pengurus LPMN.
- d. 1 (satu) orang Kaur Pencanaan
- e. 2 (dua) orang Kepala Kampung
- f. 2 (dua) orang wakil masyarakat yang satu diantaranya adalah perempuan

5. Pembentukan Tim Penyusun

- a. Tim Penyusun RPJMNag dibentuk dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMNag.
- b. Pembentukan Tim dimaksud dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Sosialisasi
Pemerintah Nagari berkewajiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang:
 - a) Rencana penyusunan RPJM-Nagari

- b) Proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari
- c) Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
- d) Jumlah, unsur dan tatacara pemilihan anggota Tim Penyusun
- e) Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Nagari.

6. Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari

- a. Rapat Pembentukan Tim dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari
- b. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim dimaksud mencakup kegiatan:

- 1) Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Nagari untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penyusun RPJM-Nagari adalah :

- a) Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
- b) Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan
- c) Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun.

- 2) Pelaksanaan/Proses rapat

Rapat dipimpin oleh Wali Nagari dan Pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Pembukaan
- b) Penjelasan materi rapat. Materi rapat dimaksud, mencakup:
 - i. Penjelasan proses penyusunan RPJM-Nagari
 - ii. Penjelasan Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - iii. Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun
 - iv. Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - v. Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan.
- c) Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari
Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati forum.
- d) Penetapan anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari.
Anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

- 3) Proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.

7. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun

- a. Wali Nagari karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM-Nagari
 - 2) Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - 3) Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - 4) Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - 5) Mengundang anggota Tim Penyusun
 - 6) Memimpin Rapat Tim Penyusun
 - 7) Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun
 - 8) Menugaskan KPMN dan LPMN memfasilitasi pengkajian keadaan Nagari
 - 9) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari
 - 10) Memastikan tersusunnya Rancangan RPJM-Nagari
- b. Sekretaris Nagari
Karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat
 - 2) Membantu Wali Nagari mengelola Rapat Tim Penyusun
 - 3) Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - 4) Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM-Nagari
- c. Pengurus LPMN, Kepala kampung dan Wakil Masyarakat tersebut di atas adalah sebagai anggota Tim Penyusun. bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Menghadiri rapat Tim Penyusun
 - 2) Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM-Nagari

8. Asistensi

Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJM-Nagari dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (kecamatan dan/atau

kabupaten) yang berkompeten, Pendamping (kecamatan dan/atau kabupaten), dan pihak lain yang berkompeten.

9. Masa Tugas

Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RPJM-Nagari oleh Wali Nagari sampai dengan ditetapkan oleh Wali Nagari kepada Bamus.

10. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM-Nagari

a. Persiapan

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah :

- 1) Memastikan kesiapan KPMN dan LPMN
- 2) Memastikan penugasan KPMN dan LPMN melakukan fasilitasi pengkajian keadaan nagari
- 3) Memastikan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun RPJM-Nagari
- 4) Memastikan tersedianya hasil-hasil MMDN dan Penggalan Gagasan tahun sebelumnya sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan nagari
- 5) Menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari
- 6) Menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari.

11. Pengkajian Keadaan Nagari

a. Pengertian

Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat nagari.

b. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang:

- 1) Potensi nagari
- 2) Permasalahan yang dihadapi

3) Kebutuhan masyarakat

c. Pendamping

Kegiatan pengkajian keadaan nagari difasilitasi oleh KPMN dan LPMN

d. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan nagari dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Nagari).

e. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Nagari, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan. Instrumen yang digunakan adalah Form-form B (Masukan) dan C (Proses) sesuai lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018.

f. Proses

- 1) Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau kampung untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- 2) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah
- 3) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
- 4) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan Peringkat Tindakan

g. Waktu Pelaksanaan

Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan nagari disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nagari yang bersangkutan.

h. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah:

- 1) Data Potensi Nagari
- 2) Data Permasalahan
- 3) Data Kebutuhan/Peringkat Tindakan Sesuai matrik lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018.

12. Penyusunan Rancangan RPJM-Nagari**a. Rancangan RPJM-Nagari**

Rancangan RPJM-Nagari dimaksud terdiri dari:

- 1) Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari
- 2) Rencana kegiatan pembangunan Nagari.
- 3) Sistematika Tata Susun Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari disusun sesuai sistematika/tata susun sebagaimana Lampiran 1.

13. Perumusan Rencana Kegiatan pembangunan Nagari

- a. Rencana kegiatan dimaksud disusun sesuai tabel rencana sebagaimana pada Lampiran 2.
- b. Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan `urusan"
- c. Urusan dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
- d. Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia. mencakup bidang dan kegiatan: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Sarana prasarana. (4) Lingkungan hidup. (5) Sosial budaya, (6) Pemerintahan, dan (6) Koperasi dan usaha masyarakat.
- e. Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat. mencakup: (1) Pertanian, (2) Peternakan ; (3) Perkebunan, (4) Pariwisata. dan (5) Kelautan/Perikanan, (6) Penanggulangan keadaan darurat (bencana/KLB)
- f. Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
- g. Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus,terukur. dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya.

14. Rapat Penyusunan

- a. Penyusunan Rancangan RPJM-Nagari dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun
- b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain. seorang Wakil Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris.
- c. Wali Nagari dan Sekretaris Nagari karena jabatannya adalah ketua dan Sekretaris Rapat Tim Penyusun.

- d. Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara demokratis.
- e. Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas.
- f. Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun.
- g. Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPJM-Nagari yang lengkap dan layak.
- h. Rapat dimaksud dipilah menjadi: (1) Rapat Pleno, dan (2) Rapat Komisi
 - 1) Rapat Pleno
 - Rapat Pleno dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan Pembangunan Nagari dan membahas hasil Rapat Komisi.
 - Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun Rapat Komisi
 - 2) Rapat Komisi
 - Rapat Komisi dimaksud membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan Nagari
 - Pembentukan Komisi dimaksud memperhatikan "Urusan" dan disesuaikan dengan jumlah anggota Tim dan kebutuhan.
 - Rapat Komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi
 - Pimpinan Rapat dimaksud terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris
 - Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.
 - 3) Waktu Penyusunan

Penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan setelah Pengkajian Keadaan Nagari sampai dengan sebelum pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM-Nagari.
 - 4) Hasil

Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (Awal) RPJM-Nagari

15. Pembahasan Rancangan RPJM-Nagari

- a. Forum Pembahasan
 - 1) Rancangan (Awal) RPJM-Nagari dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Nagari.

- 2) Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Nagari yang diselenggarakan khusus, 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. untuk membahas rancangan (Awal) RPJM-Nagari.

b. Peserta

Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Nagari dimaksud adalah :

- 1) Tim Penyusun
- 2) Wakil kelompok-kelompok masyarakat. Ormas. dan LSM
- 3) Wakil kelompok perempuan
- 4) Wakil masyarakat miskin
- 5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari
- 6) Dapat mengundang unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu
- 7) Fasilitator
- 8) Proses pembahasan Rancangan RPJM-Nagari difasilitasi oleh tim

c. Proses Pembahasan

Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan dan pengarahan oleh Camat
- 2) Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM-Nagari oleh Wali Nagari
- 3) Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPJM-Nagari oleh Tim Penyusun
- 4) Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Nagari
- 5) Tanggapan balik Wali Nagari Tim Penyusun
- 6) Pembahasan oleh peserta
- 7) Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
- 8) Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
- 9) Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi. yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris.
- 10) Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
- 11) Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang
- 12) Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM-Nagari oleh Wali Nagari.

d. Penutupan oleh Wali Nagari

e. Hasil

Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari.

16. Penetapan Rancangan RPJM-Nagari**a. Forum Penetapan**

- 1) Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari ditetapkan dalam Forum Rapat BAMUS. Yang diselenggarakan oleh dan sesuai Peraturan Tata Tertib BAMUS
- 2) Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BAMUS.

b. Peserta Rapat

Peserta Rapat BAMUS untuk penetapan Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari adalah :

- 1) Semua Anggota BAMUS
- 2) Wali Nagari
- 3) Sekretaris Nagari
- 4) Semua Kasi, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintah Nagari
- 5) Anggota Tim Penyusun Rancangan RPJM-Nagari
- 6) Wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan masyarakat miskin.
- 7) Pengurus Ormas dan/atau LSM
- 8) Unsur masyarakat lainnya

c. Sifat Rapat

- 1) Rapat BAMUS untuk penetapan Pernag tentang RPJM-Nagari bersifat terbuka untuk umum
- 2) Penetapan/Pengesahan
- 3) Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Nagari (Pernag)

17. Pengajuan Rancangan Pernag

Wali Nagari wajib mengajukan Rancangan Pernag tentang RPJM-Nagari kepada BAMUS. paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Nagari Pembahasan Rancangan (Awal) RPJM-Nagari

a. Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BAMUS

- 1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Pernag dimaksud diterima. BAMUS menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Pernag tentang RPJM-Nagari
- 2) Rapat Penetapan dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Pernag tentang RPJM-Nagari diterima.



b. Proses Rapat Penetapan

- 1) Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat
- 2) Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari oleh Wali Nagari
- 3) Tanggapan Anggota BAMUS
- 4) Jawaban Wali Nagari (Tim Penyusun)
- 5) Pengambilan Keputusan/Penetapan Pernag tentang RPJM- Nagari
- 6) Penandatanganan naskah Pernag oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS.
- 7) Hasil
- 8) Peraturan Nagari (Pernag) tentang RPJM-Nagari

18. Sumber Dana

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM-Nagari dipenuhi dari sumber dana:

- a. APBD Kabupaten/Kota
- b. APBD Propinsi
- c. APBN
- d. APB Nagari
- e. Sumber lain yang tidak mengikat
- f. Swadaya Masyarakat



BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

4.1.VISI NAGARI

Visi dalam hal ini adalah Visi Pemerintahan Nagari, yaitu Visi Wali Nagari. Visi Pemeritahan Nagari pada dasarnya merupakan gambaran masadepan yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Nagari dalam periode 2018 s/d 2024. Fungsi Visi Pemerintah Nagari, terutama sebagai arah bagi perjalanan Pemerintah Nagari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya.

Berdasarkan uraian pada gambaran umum kondisi Nagari dapat disimpulkan bahwa di Nagari Aur Duri Surantih masih dijumpai masalah masalah yang perlu ditangani sungguh sungguh pada periode 2018 s/d 2024 yaitu pada bidang : Ekonomi Rakyat, Pendidikan, Kesehatan, Infra Struktur, Lingkungan, Kemiskinan, Pengangguran dan Pemerintahan. Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka Pemerintah Nagari Aur Duri Surantih dalam periode 2018 s/d 2024 menetapkan Visi sebagai berikut :

“Terbangunnya pemerintahan nagari yang baik,bersih dan bermartabat sebagai nagari yang Mandiri,bersatu,aman,berbudaya dan beraklaq mulia guna mewujudkan masyarakat sejahtera,adil dan makmur ”.

4.2.Misi

Berdasarkan Visi diatas maka Misi yang dicapai sebagai Wali Nagari Aur Duri Surantih Priode 2018-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja & kapasitas Perangkat Nagari secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundangan, guna tercapainya pelayanan yang baik dan bersih bagi masyarakat.

*Program kerjanya, dengan adanya **Pemekaran Kampung**Timbulun dan Pasir nan Panjang menjadi 5 (lima) Kampung dinagari Aur Duri Surantih,sehingga informasi & pelayanan dari pemerintahan nagari cepat & merata.*

2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas serta mendayagunakan kelembagaan,organisasi dan kelompok masyarakat lainnya yang ada dinagari Aurduri Surantih (BAMUS, LPMN, KAN, PKK, BUMNag, Pemuda, Majlis Taklim) dan kelompok masyarakat Lainnya.

Program kerjanya : Organinsasi & kelompok masyarakat akan ditumbuh kembangkan dan bakal ada “ **Piala Wali Nagari Aurduri Surantih** “ sebagai wadah/alat



pemersatu dan penggerak kegiatan pembangunan yang bersifat partisipasi.

3. Melaksanakan Pembangunan & Pemberdayaan masyarakat secara jelas, terarah, terukur dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat sehingga terwujud secara bertahap kesejahteraan masyarakat nagari Aurduri Surantih.

Program kerja: **Pembangunan fasilitas umum nagari** yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pengelolaan jalan usaha tani, saluran irigasi pertanian, jalan lingkung pemukiman, gang, sarana air bersih, rumah layak huni, sarana keagamaan dan pendidikan serta infra struktur lainnya. **Pemberdayaan sumber daya manusianya** dalam peningkatan ketrampilan yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dan mensukseskan program Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, Anggota DPRD Kabupaten, provinsi dan Pusat, serta Perantau lainnya dalam rangka Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat dinagari Aurduri Surantih, sesuai juga dengan nawa-cita Presiden kita “ **Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa-desa dalam kerangka NKRI** “ dan Visi Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan “ **Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamais, dan sejahtera**”.

Program kerjanya: Berkomunikasi yang baik dalam rangka mengajak membawa program dari Pemda, Anggota DPRD, dan Perantau untuk bersama-sama membangun nagari aurduri surantih.

5. Meningkatkan Partisipasi, keterlibatan dan keikutertaan masyarakat dan menampung aspirasi dari unsur masyarakat nagari aurduri surantih dalam merencanakan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program pembangunan nagari yang termuat dalam dokumen RPJM nagari 6 tahun kedepannya agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Program kerjanya : Mengikutsertakan unsur masyarakat dalam musyawarah nagari, baik musyawarah perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban & pelestarian dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari aurduri surantih.

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal atau non formal serta pemahaman dan pengamalan norma-norma agama, budaya, dan adat istiadat.

Program kerjanya : Pembinaan Guru TK/PAUD, MDA/TPA & PEMBERDAYAAN Ninik Mamak, ulama, dan lain-lain guna mewujudkan masyarakat yang agamais dan berakhlak mulia.



7. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan hidup bersih masyarakat nagari aurduri surantih.

Program kerjanya : Sosialisasi kesehatan, germas, sanitasi/jambanisasi, pembangunan/rehab poskesri/posyandu, pembangunan rumah baru/rehab rumah tidak layak huni,

Tabel. 4.16 SinkronisasiMisi RPJM Kabupatendengan RPJM Nagari

No	Misi RPJM Daerah KabupatenPesisir Selatan	Misi RPJM Nagari AurDuri Suarantih	
1	Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1	Meningkatkan kinerja & kapasitas Perangkat Nagari secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundangan, guna tercapainya pelayanan yang baik dan bersih bagi masyarakat.
2	Meningkatkan Pembangunan Insfratraktur perekonomian dan Insfratraktur sosial yang terkait dengan sector unggulan daerah	3	Melaksanakan Pembangunan & Pemberdayaan masyarakat secara jelas,terarah,terukur dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat sehingga terwujud secara bertahap kesejahteraan masyarakat nagari Aurduri Surantih
3	Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK	2	Pembinaan dan peningkatan kapasitas serta mendayagunakan kelembagaan, organisasi dan kelompok masyarakat lainnya yang ada dinagari Aur Duri Surantih (BAMUS, LPMN, KAN, PKK, BUMNag, Pemuda, Majelis Taklim) dan kelompok masyarakat Lainnya.
4	Meningkatkan Produksi dan nilai tambahdengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	4	Menjalin hubungan kerja sama yang baik dan mensukseskan program Pemerintah Kabupaten,Provinsi dan Pusat,Anggota DPRD Kabupaten,provinsi dan Pusat,serta Perantau lainnya dalam rangka Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat dinagari Aur Duri



			Surantih,sesuai juga dengan nawacita Presiden kita
		5	Meningkatakan Partisipasi, keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dan menampung aspirasi dari unsur masyarakat Nagari Aur Duri Surantih dalam merencanakan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program pembangunan nagari yang termuat dalam dokumen RPJM nagari 6 tahun kedepannya agar tercapai kesejahteraan masyarakat
5	Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang	6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal atau non formal serta pemahaman dan pengamalan norma-norma agama, budaya, dan adat istiadat.
		7	Meningkatakan kualitas kesehatan masyarakat dan hidup bersih masyarakat Nagari AurDuri surantih.

4.2.1. TUJUAN DAN SASARAN

4.2.1.1.Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahanpembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

4.2.1.2.Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagairujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan maka Nagari AurDuri Surantih perlu menetapkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :



Tabel. 4.16 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Visi : “ Terbangunnya pemerintahan nagari yang baik,bersih dan bermartabat sebagai nagari yang mandiri,bersatu,aman,berbudaya dan berakhlak mulia, Sejahtera,adil dan makmur ”				
No	Misi	Tujuan	Sasaran	ArahKebijakan
1	Meningkatkan kinerja & kapasitas Perangkat Nagari secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundangan, guna tercapainya pelayanan yang baik dan bersih bagi masyarakat. .	Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari; 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari; 3. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas;	1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari 2. Pembangunan Sarana Prasana Pemerintahan 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa 4. Meningkatkan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan 5. Pelaksanaan kegiatan perhubungan, komunikasi dan informatika
		Menciptakan Aparatur Pemerintah Nagari yang Berkompeten	1. Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur Pemerintah sesuai Kompetensi 2. Pengembangan Profesi	1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan 2. Pengadaan sarana aparatur



			Berkelanjutan Melalui pelatihan	pemerintahan Nagari 3. Peningkatan disiplin kerja sesuai dengan topoksi
2	Pembinaan dan peningkatan kapasitas serta mendayagunakan kelembagaan, organisasi dan kelompok masyarakat lainnya yang ada dinagari Aur Duri Surantih (BAMUS, LPMN, KAN, PKK, BUMNag, Pemuda, Majelis Taklim)	Menjamin Penegakkan Hukum, HAM, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Sosial	1. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak; 2. Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan; dan	1. Peningkatan kapasitas PKK dalam bidang perlindungan perempuan dan anak 2. Pembinaan tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		Meningkatkan Kerjasamaantar Lembaga (Keagamaan, Adat, Kemasyarakatan/ LSM, Ormas, Asosiasi dan Perguruan Tinggi) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi; dan 2. Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan / Asosiasi / LembagaSwasta.	1. Kegiatan perencanaan pembangunan Pembangunan 2. Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat 3. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga masyarakat 4. Pemberdayaan kegiatan perdagangan dan perindustrian



		Pengembangan dan Pembinaan BUMNag	1. Membangun Sarana dan Pasarana Bumrag 2. Penambahan modal BUMNag 3. Peningkatan kapasitas dan pengembangan BUMNag	1. Peningkatan kapasitas pengurus BUMNag 2. Pembinaan dan pengadaan sarana dan prasarana BUMNag 3. Dukungan penanaman modal BUMNag
		Meningkatnya partisipasi warga dan pemuda dalam pembangunan	1. Terlaksananya kegiatan pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan 2. Terlaksananya Pelatihan dan pendidikan Tanggap Darurat kebencanaan	1. Pembinaan kegiatan kepemudaan dan olah raga 2. Sarana dan prasaran tanggap darurat
3	Melaksanakan Pembangunan & Pemberdayaan masyarakat secara jelas,terarah,terukur dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat sehingga terwujud secara bertahap kesejahteraan masyarakat nagari	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar	1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan; 2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jembatan; 3. Meningkatkan Akses Air Irigasi untuk Pertanian; 4. Meningkatkan Akses Listrik untuk Masyarakat;	1. Pembangunan pekerjaan umum dan penata ruang 2. Pembangunan kawasan pemukiman



	Aurduri Surantih		5. Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat; 6. Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat.	
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	1. Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga; 2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan; 3. Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan; dan 4. Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan.	1. Pembangunan kawasan pemukiman 2. Pengelolaan lingkungan hidup
		Mengembangkan Sektor Ekonomi sesuai Potensi, Kesesuaian Lahan dan Karakteristik Masyarakat	1. Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan 2. Meningkatnya Produksi Ternak dan pertanian	1. Pemberdayaan kegiatan pertanian dan peternakan 2. Pengadaan sarana pertanian dan peternakan



		Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	1. Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani, ternak, wanita tani dan Nelayan; 2. Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM; 3. Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif.	1. Pembinaan KelompokTani, ternak, wanita tani dan Nelayan 2. Pemberdayaan kegiatan koperasi, Usaha mikro kecil dan menengah
		Mengembangkan Pariwisata dan Pelestarian Budaya Lokal dan keagamaan sesuai dengan Potensi yang Dimiliki	1. Pelestarian Budaya Lokal; 2. Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal dan keagamaan; dan 3. Pengembangan Pariwisata Daerah	1. Pembinaan kebudayaan dan keagamaan
		Menciptakan Iklim Usaha yang Kompetitif	1. Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi; 2. Penyediaan Lembaga dan Informasi Perdagangan; 3. PenyediaanTenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas; dan 4. Meningkatnya Perlindungan	1. Kegiatan pendataan kelembagaan di Nagari 2. Kegiatan pembinaan kelembagaan 3. Penguatan modal



			Ketenaga kerjaan	
4	Menjalin hubungan kerja sama yang baik dan mensukseskan program Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, Anggota DPRD Kabupaten, provinsi dan Pusat, serta Perantau lainnya dalam rangka Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat dinagari Aur Duri Surantih, sesuai juga dengan nawacita Presiden kita	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1. Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan; 2. Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari.	1. Pemberdayaan dan pembinaan lembaga masyarakat 2. Memotifasi masyarakat unutup mensukseskan pembangunan
5	Meningkatakan Partisipasi, keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dan menampung aspirasi dari unsur masyarakat Nagari Aur Duri Surantih dalam merencanakan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program pembangunan nagari yang termuat dalam dokumen RPJM nagari 6 tahun kedepannya agar	Mensukseskan pencapaian Visi dan Misi 6 Tahun kedepan	1. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) 2. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat, serta Anggota DPRD Kabupaten/provinsi/Pusat dan Perantau.	1. Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat 2. Meleksanakan musyawarah untuk perencanaan pembangunan nagari dalam meningkatkan kualitas pembangunan



	tercapai kesejahteraan masyarakat			
6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal atau non formal serta pemahaman dan pengamalan norma-norma agama, budaya, dan adat istiadat.	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan bagi Kehidupan Bermasyarakat	1. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat yang Pancasila; 2. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	1. Pembinaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		Meningkatk akses pendidikan yang berkualitas	1. Terpenuhi sarana dan prasarana belajar yang seimbang pada semua jenjang pendidikan 2. Terciptanya Proses Pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat pada semua jenjang pendidikan 3. Meningkatnya minat baca masyarakat	1. Dukungan pendidikan bagi siswa kurang mampu / berprestasi 2. Meningkatnya akses pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat 3. Terepenuhinya sarana dan prasarana pendukung bagi pendidik dan tenaga kependikan
7	Meningkatakan kualitas kesehatan masyarakat dan hidup bersih masyarakat Nagari Aur Duri surantih.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Pencegahan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita; 2. Penurunan Angka Kesakitan	1. Meningkatnya Status Gizi; 2. Meningkatnya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana



			Masyarakat;	Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah.
		Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	1. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat 2. Pemenuhan Tenaga Kesehatan yang Merata dan Berkualitas;	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan, sesuai dengan Kebutuhan; 2. Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat



4.3. Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nagari

Arah kebijakan umum merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Wali Nagari terpilih sebagai arah bagi aparat pemerintah nagari, guna mencapai kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Secara rinci arah kebijakan umum beberapa sector penting adalah sebagai berikut

1. Bidang Pemerintahan Nagari

Arah kebijakan umum kegiatan pemerintahan nagari adalah penataan kelembagaan pemerintah nagari, peningkatan kinerja aparatur pemerintahan nagari, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan nagari, penguatan dalam pendanaan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Prioritas Kegiatan

- a. Penetapan dan penegasan batas Nagari;
- b. Pendataan Nagari;
- c. Penyusunan tataruang Nagari;
- d. Penyelenggaraan musyawarah Nagari;
- e. Pengelolaan informasi Nagari;
- f. website nagari
- g. penyelenggaraan perencanaan Nagari;
- h. penyelenggaraan peringatan hari jadi nagari;
- i. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Nagari;
- j. penyelenggaraan kerjasama antar Nagari;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Wali Nagari;
- k. penyelenggaraan piala wali nagari terbaik; dan
- l. kegiatanlainnya sesuai kondisi Nagari.

2. Bidang Pembangunan

Arahkebijakan umum pembangunan adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan kebutuhan dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perhubungan/komunikasi/informatika, dan pariwisata

Prioritas Pembangunan

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Nagari antara lain:



1. pembangunan irigasi
 2. pembagunan rumah tidak layak huni
 3. pembangunan embung mini
 4. pembangunan sarana olah raga
 5. pembukaan jalan baru
 6. pemeliharaanjalannagari
 7. jalan pemukiman;
 8. jalan Nagari antar permukiman kewilayah pertanian;
 9. jalan lingkung permukiman masyarakat Nagari; dan
 10. infrastrukturNagarilainnyasesuaikondisiNagari.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. gedung poskesri
 2. air bersih berskala Nagari;
 3. sanitasi lingkungan;
 4. Jambanisasi rumah tangga
 5. Pelayanan kesehatan Nagari seperti posyandu; dan
 6. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. pembangunan gedung MDTQ
 2. taman bacaan masyarakat;
 3. pendidikan anak usia dini;
 4. Peningkatan nagari layak anak;
 5. Pembangunan pustaka nagari;
 6. balaipelatihan/kegiatan belaja rmasyarakat;
 7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 8. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pasar Nagari;
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Nagari;
 3. Penguatan permo dalam BUM Nagari;



4. pengadaan bibit sawit unggul;
 5. pembibitan tanaman pangan (Penangkar benih);
 6. penggilingan padi;
 7. lumbung Nagari;
 8. pengelolaan hasil usaha tani Nagari;
 9. kolamikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. Pembangunan pasar nagari
 12. Pengadaan sapi pejantan unggul;
 13. Kandang ternak;
 14. Mesinpakan ternak;
 15. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Nagari.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. perlindungan mata air;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. pembersihan daerah aliran irigasi;
 6. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.

3. Bidang Pembinaan

Arah kebijakan umum bidang pembinaan adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia untuk menggali potensi Nagari, meliputi ketentraman, ketertipan, perlindungan masyarakat, ketentraman masyarakat, pemudah olah raga, dan lembaga kemasyarakatan.

Prioritas kegiatan

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kelompok tani, ternak, wanita tani, perikanan;
- g. pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat; dan
- h. kegiatan lain sesuai kondisi Nagari.



4. Bidang Pemberdayaan

Arah kebijakan umum Bidang Pemberdayaan adalah untuk peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam menunjang kesejahteraan serta sumber daya manusia, meliputi perikanan, pertanian dan perikanan, peningkatan kapasitas aparatur nagari, pemberdayaan perempuan, koperasim, Bumnag, dan perdagangan.

Prioritas kegiatan

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari, perangkat Nagari, dan Badan Pemusyawaratan Nagari;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Nagari;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani, ternak, kwt, perikanan;
 5. kelompok masyarakat miskin,
 6. kelompok nelayan,
 7. kelompok pengrajin,
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Nagari.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Keadaan Mandesak Nagari

Arah kebijakan umum Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Keadaan mendesak nagari merupakan keadaan nagari yang sangat penting karena Nagari Aur Duri Surantih termasuk zona Rawan bencana, seperti Banjir, longsor tebing sungai, longsor bukit, kebakaran dan angin puting beliung.

Prioritas Kegiatan

- a. Perlunya sarana dan prasarana penanganan bencana, dalam keadaan darurat dan keadaan mendesak Nagari.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Aur Duri Surantih Tahun 2018 s/d 2024 adalah dokumen perencanaan nagari untuk periode 6 tahun kedepan, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Nagari yang berpedoman kepada Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 420/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahunan.

Berdasarkan hasil kajian terhadap Kondisi Nagari,Potensi dan Masalah.Serta daftar RPJMNag 2018 s/d 2024,maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat banyak masalah dan potensi untuk mencapai Visi dan Misi Nagari.
2. Dibutuhkan perhatian lebih dalam Peningkatan,Pengembangan dan Pemanfaatan Pembangunan Nagari.
3. Diperlukan komitmen yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan Pembangunan Nagari.
4. Keberhasilan Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin kelangsungan Pembangunan Nagari.
5. Keberhasilan Pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana Komitmen dan Konsisten Pemerintahan dan Masyarakat Nagari saling bekerja sama membangun Nagari.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada,maka beberapa Saran yang perlu disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) merupakan satu-satunya Dokumen Perencanaan yang diakui di Nagari,dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan selama priode 2018 s/d 2024.Yang selanjutnya setiap tahunya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPNag).
2. Dalam pelaksanaan dan implementasi RPJMNag ini, diharapkan adanya review, evaluasi dan pengawasan yang mendalam untuk menjaga konsistensi Pembangunan Nagari.
- 3 Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

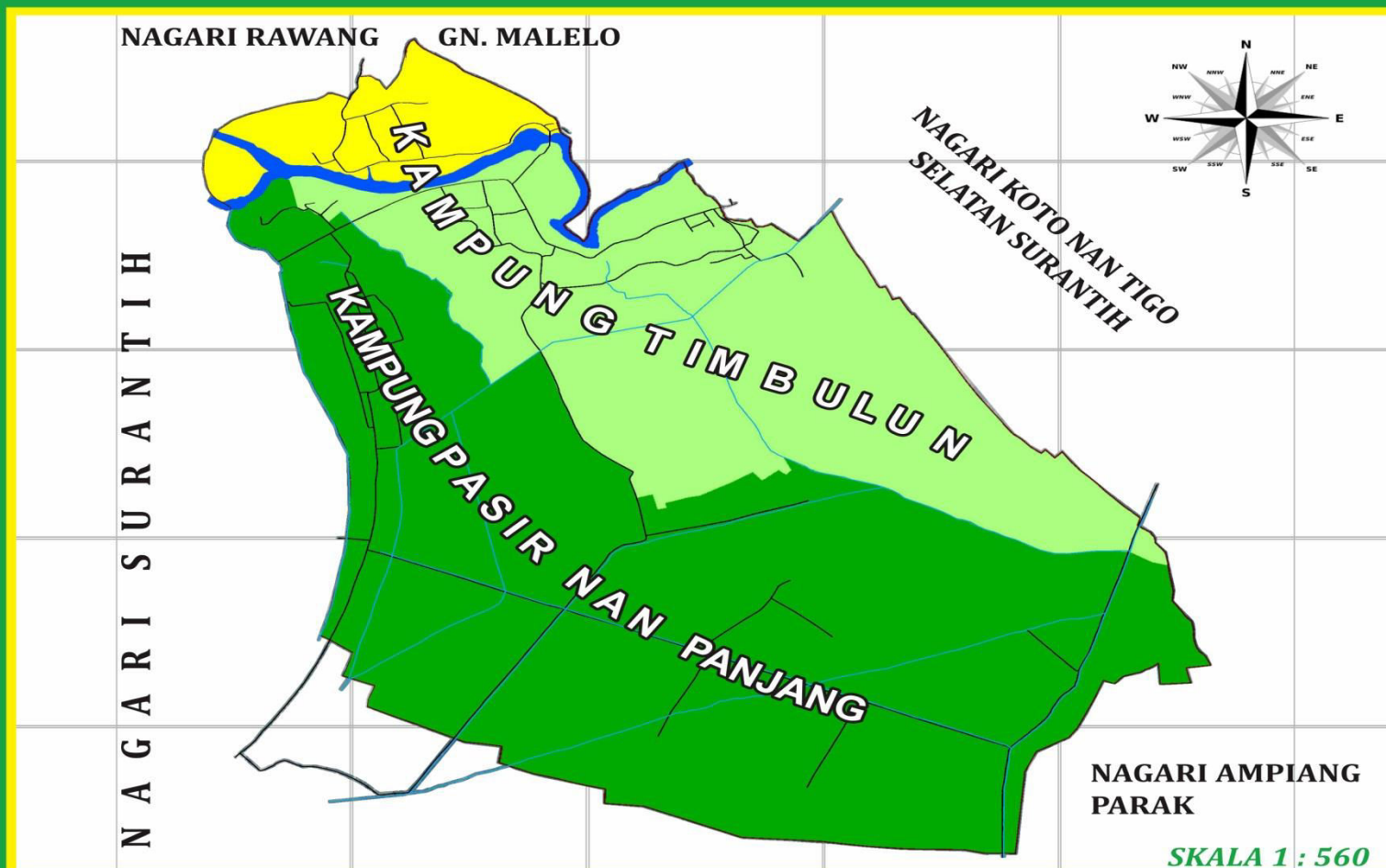


Nagari (RPJMNag) Aur Duri Surantih Tahun 2018-2024, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman, dan komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta pemangku kepentingan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2018-2024.

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
NAGARI AUR DURI SURANTIH



KETERANGAN PETA

NAGARI AUR DURI SURANTIH

Negara : Indonesia
Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pesisir Selatan
Kecamatan : Sutera
Nagari/Desa : Aur Duri Surantih
Tipe Peta : *Chorografi*
Kartografer : Nofrianto
Tahun : 2017
Skala : 1:560

— : Batas Nagari
— : Jalan
— : Irigasi
— : Batang Surantih
— : Kampung Pasir Nan Panjang
— : Kampung Timbulun

Garis Keliling : 8,69 Mil/14 KM
Luas : 3,21 Mil Persegi/831 Ha
Garis Lintang : 1°36'4.82"S
Garis Bujur : 100°40'30.50"T



